

**PERAN KOMISARIS INDEPENDEN DALAM MEMODERASI  
PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN PENGHINDARAN  
PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN**

**TESIS**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan Mencapai  
derajat Sarjana S2

Program Magister Akuntansi



Disusun Oleh :

Aurum Rizqianto Fauzi

NIM : 21402400005

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2026**

**TESIS**

**THE ROLE OF INDEPENDENT COMMISSIONERS IN  
MODERATING THE IMPACT OF POLITICAL  
CONNECTIONS AND TAX AVOIDANCE ON FIRM VALUE**

Disusun Oleh :

Aurum Rizqianto Fauzi

NIM : 21402400005

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan sidang  
panitia ujian Tesis Program Magister Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung  
Semarang

**UNISSULA**

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
Semarang, 24 Februari 2026

Pembimbing,



Dr. M. Ja'far Shodiq, S.E., SSi, M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA.

NIK. 211498009

## Lembar Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aurum Rizqianto Fauzi  
NIM : 21402400005  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya ajukan dengan judul “*The Role of Independent Commissioners in Moderating the Impact of Political Connections and Tax Avoidance on Firm Value*” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik Magister Akuntansi, baik di Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun di perguruan tinggi lainnya. Tesis ini berisi rumusan dan gagasan hasil penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dan bimbingan dari dosen pembimbing. Selain itu, dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain maupun penulis sendiri, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang serta dicantumkan dalam daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, .... Januari 2026  
Yang membuat pernyataan,

Aurum Rizqianto Fauzi

## Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh koneksi politik dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan serta menguji peran komisaris independen dalam memoderasi hubungan tersebut. Fokus penelitian diarahkan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), mengingat sektor ini memiliki tingkat keterkaitan yang tinggi dengan kebijakan pemerintah dan pengawasan regulator.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan selama periode pengamatan tertentu. Teknik analisis data yang digunakan meliputi regresi data panel dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menguji peran komisaris independen sebagai variabel moderasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik dan penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa koneksi politik dan strategi penghindaran pajak dapat dipersepsikan oleh pasar sebagai upaya perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing, meskipun di sisi lain juga mengandung potensi risiko tata kelola. Selanjutnya, komisaris independen terbukti mampu memoderasi pengaruh koneksi politik dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan, yang menunjukkan pentingnya mekanisme tata kelola perusahaan dalam mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan transparansi.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur mengenai koneksi politik, penghindaran pajak, dan tata kelola perusahaan, khususnya pada sektor keuangan di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen, investor, dan regulator dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengawasan guna menjaga keberlanjutan serta meningkatkan nilai perusahaan.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh koneksi politik dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan serta menguji peran komisaris independen dalam memoderasi hubungan tersebut. Penelitian difokuskan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), mengingat sektor ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan kebijakan pemerintah dan pengawasan regulator. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan selama periode pengamatan tertentu. Teknik analisis data dilakukan dengan regresi data panel dan *moderated regression analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik dan penghindaran pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik koneksi politik dan strategi penghindaran pajak dapat dipersepsikan pasar sebagai upaya perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing, namun juga berpotensi menimbulkan risiko tata kelola. Selain itu, komisaris independen terbukti berperan dalam memoderasi pengaruh koneksi politik dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan, yang mencerminkan pentingnya mekanisme tata kelola perusahaan dalam mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan transparansi.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengayaan literatur mengenai koneksi politik, penghindaran pajak, dan tata kelola perusahaan, khususnya pada sektor keuangan di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi manajemen, investor, dan regulator dalam merancang kebijakan dan pengawasan yang mampu menjaga keberlanjutan serta meningkatkan nilai perusahaan.

**Kata kunci:** koneksi politik, penghindaran pajak, komisaris independen, nilai perusahaan

## **Abstract**

*This study aims to analyze the effect of political connections and tax avoidance on firm value and to examine the moderating role of independent commissioners in this relationship. The research focuses on financial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), considering the sector's strong dependence on government policies and regulatory oversight. A quantitative research approach is employed using secondary data derived from firms' financial statements and annual reports over a specific observation period. Data analysis is conducted using panel data regression and moderated regression analysis (MRA).*

*The results indicate that political connections and tax avoidance have a significant effect on firm value. These findings suggest that political connections and tax avoidance strategies may be perceived by the market as efficiency-enhancing mechanisms that improve competitiveness, while simultaneously posing governance-related risks. Furthermore, independent commissioners are proven to moderate the relationship between political connections and tax avoidance on firm value, highlighting the importance of effective corporate governance mechanisms in mitigating agency conflicts and enhancing transparency.*

*The contribution of this study lies in enriching the literature on political connections, tax avoidance, and corporate governance, particularly within the context of the Indonesian financial sector. Practically, the findings provide valuable insights for corporate management, investors, and regulators in formulating strategies and regulatory frameworks that support sustainable corporate practices and enhance firm value.*

**Keywords:** *political connections, tax avoidance, independent commissioners, firm value*

## Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul “*The Role of Independent Commissioners in Moderating the Impact of Political Connections and Tax Avoidance on Firm Value*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi (S2) pada Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh koneksi politik dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan serta peran komisaris independen sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur akuntansi dan tata kelola perusahaan serta menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen, investor, dan regulator. Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan dukungan akademik dan fasilitas selama penulis menempuh pendidikan pada Program Magister Akuntansi.
2. Prof. Dr. Edy Suprianto, S.E., M.Si., Akt., CA., CRP., selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi, yang telah memberikan arahan, kebijakan akademik, serta dukungan selama proses pendidikan dan penyusunan tesis ini.
3. Bapak Dr. M. Ja'far Shodiq, S.E., S.Si., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta kritik yang konstruktif selama proses penyusunan tesis ini.
4. Seluruh dosen Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan akademik selama masa perkuliahan.
5. Pihak-pihak terkait, baik institusi maupun individu, yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
6. Kedua orang tua penulis, yang senantiasa memberikan dukungan moral, doa, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan tesis ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi dan tata kelola perusahaan.

## Daftar Isi

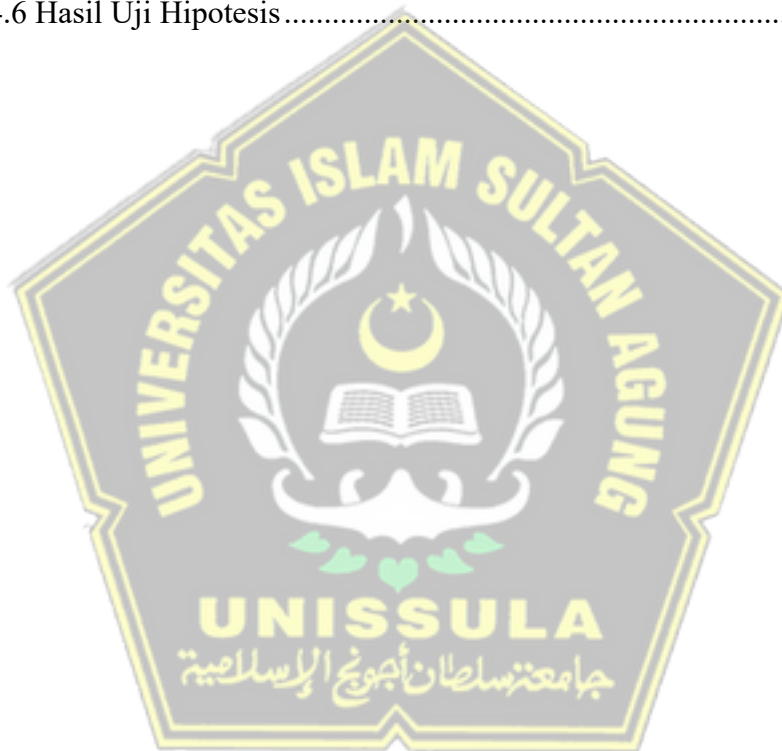
Cover Tesis .....	i
Halaman Persetujuan Tesis .....	ii
Lembar Pernyataan .....	iii
Intisari .....	iv
Abstrak.....	v
<i>Abstract</i> .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar .....	xi
Daftar Lampiran.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b> .....	13
2.1 Kajian Pustaka .....	13
2.2 Penelitian Terdahulu .....	29
2.3 Kerangka Penelitian.....	34
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	45
3.1 Jenis Penelitian .....	45
3.2 Populasi Dan Sampel.....	46
3.3 Sumber Data dan Jenis Data .....	47
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	47
3.5 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variabel.....	48
3.6 Teknik Analisis Data.....	51

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
4.1    Deskripsi Sampel Penelitian .....	56
4.2    Hasil Analisis Data .....	57
4.3    Pembahasan .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
5.1    Kesimpulan .....	73
5.2    Implikasi .....	74
5.3    Keterbatasan Penelitian.....	76
5.4    Agenda Penelitian Mendatang .....	77
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>



## Daftar Tabel

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Indikator Variabel.....	48
Tabel 4.1 Kriteria Penentuan Sampel Penelitian .....	56
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif .....	57
Tabel 4. 3 Hasil <i>Koefisien Determinasi</i> ( $R^2$ ).....	60
Tabel 4.4 Hasil <i>Uji Q-Squared</i> .....	61
Tabel 4.5 Hasil <i>Effect Size</i> ( <i>F-Square</i> ).....	61
Tabel 4.6 Hasil Uji Hipotesis.....	64



## Daftar Gambar

<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Penelitian .....	36
<b>Gambar 4.1</b> Hasil Uji Hipotesis .....	63



## Daftar Lampiran

<b>Lampiran 1.</b> Daftar Perusahaan Keuangan tercatat di BEI.....	85
<b>Lampiran 2.</b> Hasil sampling data .....	88
<b>Lampiran 3.</b> Hasil olah data menggunakan <i>WarpPLS</i> 8.0 .....	93





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai faktor strategis untuk meningkatkan nilai perusahaan dan menarik minat investor (Al-Qudah & Houcine, 2023). Salah satu sektor yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian adalah sektor keuangan. Perusahaan di sektor ini menghadapi tantangan yang kompleks, terutama terkait dengan kebijakan, regulasi, dan hubungan dengan pemerintah. Koneksi politik menjadi salah satu faktor yang sering dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan strategis, seperti akses informasi dan dukungan kebijakan yang menguntungkan (Eissa & Eliwa, 2021). Namun, tidak semua koneksi politik berdampak positif, karena dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan, terutama jika terjadi perubahan kebijakan atau pemerintahan yang dapat mempengaruhi hubungan tersebut (Supatmi et al. 2021).

Beberapa perusahaan di sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menghadapi sejumlah tantangan dan peluang di tahun 2024 yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi domestik dan global. Berdasarkan laporan terkini, beberapa perusahaan yang dapat dikenali dengan dampak besar pada 2024 antara lain Bank Mandiri dan Adira *Finance*. Bank Mandiri, Bank terbesar di Indonesia ini mengalami pertumbuhan signifikan pada semester pertama 2024,

dengan laba bersih mencapai Rp26,6 triliun dan penyaluran kredit tumbuh sebesar 20,5% (OJK, 2024). Kondisi ini menunjukkan dampak positif dari stabilitas ekonomi domestik dan ekspektasi pertumbuhan sektor perbankan (Al-Qudah & Houcine, 2023). Penurunan suku bunga acuan global dapat memberikan peluang bagi Bank Mandiri untuk meningkatkan kinerja kredit dan keuntungan. Namun, tantangan juga muncul dari kondisi ekonomi global yang dipengaruhi oleh ketidakpastian geopolitik, yang dapat menambah risiko terkait suku bunga dan inflasi (Efendi et al., 2022).

Selain itu, Bank Muamalat Indonesia sebagai pionir bank syariah di Indonesia juga menghadapi tantangan serupa dalam menjaga kinerja dan nilai perusahaannya. Berdasarkan laporan kinerja 2023–2024, Bank Muamalat mencatat pertumbuhan positif pada pembiayaan syariah seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk keuangan syariah (Anisa & Wulandari, 2021). Namun, bank ini juga harus menghadapi tantangan permodalan dan kebutuhan restrukturisasi untuk memperkuat daya saingnya di tengah persaingan industri perbankan (Pratama, 2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa tidak hanya bank konvensional seperti Bank Mandiri, tetapi juga bank syariah seperti Bank Muamalat memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan pemerintah dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (Rahmawati, 2020).

Setelah melihat fenomena pada sektor perbankan, baik konvensional maupun syariah, penting juga untuk menyoroti dinamika pada lembaga keuangan non-bank. Salah satu yang memiliki peran signifikan adalah perusahaan *multifinance*, yang menjadi motor penggerak pembiayaan konsumsi masyarakat. Perusahaan

*multifinance* ini melaporkan peningkatan piutang pembiayaan sebesar 15% pada semester pertama 2024. Adira *Finance* mendapat keuntungan dari meningkatnya permintaan pembiayaan sektor otomotif. Penurunan suku bunga yang diperkirakan akan terjadi di 2024 juga berpotensi meningkatkan aktivitas pembiayaan dan permintaan kredit (Al-Qudah & Houcine, 2023). Namun, sektor ini tetap harus waspada terhadap pengetatan likuiditas dan kenaikan *cost of funds* yang disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) (Efendi et al., 2022). Hal ini menunjukkan adanya potensi pertumbuhan yang didorong oleh kondisi ekonomi domestik yang relatif stabil dan kebijakan moneter yang mendukung, seperti penurunan suku bunga.

Sektor keuangan ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, salah satunya adalah ketidakpastian ekonomi global yang dapat memengaruhi strategi bisnis dan keputusan keuangan perusahaan. Dalam kondisi tersebut, risiko yang terkait dengan koneksi politik dan praktik penghindaran pajak menjadi semakin relevan, terutama karena hubungan erat antara perusahaan dengan pemerintah serta regulator sektor keuangan dapat memengaruhi keberlanjutan usaha (Kristanto, 2020).

Koneksi politik sering kali dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mendapatkan akses istimewa terhadap kebijakan pemerintah, pendanaan, dan peluang bisnis strategis. Di Indonesia, fenomena ini sangat relevan karena perusahaan sektor keuangan, seperti perbankan dan asuransi, memiliki hubungan erat dengan pemerintah dan regulator. Meskipun koneksi politik dapat memberikan keuntungan kompetitif, seperti akses lebih mudah ke pendanaan atau pengurangan pengawasan

regulasi, praktik ini juga membawa risiko besar. Ketergantungan yang tinggi pada koneksi politik dapat menyebabkan perusahaan rentan terhadap perubahan kebijakan pemerintah atau ketidakstabilan politik, yang pada akhirnya dapat menurunkan nilai perusahaan (Eissa & Eliwa, 2021).

Selain koneksi politik, fenomena penghindaran pajak juga menjadi isu penting dalam sektor keuangan di Indonesia. Dari sisi negatif, praktik ini dipandang merugikan negara karena mengurangi penerimaan pajak, menurunkan transparansi laporan keuangan, serta menimbulkan risiko reputasi yang dapat berdampak pada nilai perusahaan (Frank et al., 2009; Hanlon & Heitzman, 2010). Sementara dari sisi positif, penghindaran pajak sering dianggap sebagai bentuk efisiensi keuangan melalui strategi *legal tax planning*, di mana perusahaan dapat mengurangi beban pajak untuk kemudian mengalokasikan dana tersebut pada ekspansi usaha, investasi, atau peningkatan kinerja jangka pendek (Desai & Dharmapala, 2009).

Penelitian mengenai koneksi politik terhadap nilai perusahaan sudah cukup banyak dilakukan. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Pratama & Setiawan, (2019), menemukan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan karena memberikan akses kepada kebijakan pemerintah dan peluang proyek strategis. Demikian pula, Cahyono & Ardianto, (2024) menunjukkan bahwa koneksi politik memperkuat hubungan antara modal intelektual dan kinerja perusahaan, yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Supatmi et al. (2021) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Efendi et al., (2022) menunjukkan bahwa koneksi politik dapat menurunkan nilai perusahaan secara langsung karena risiko konflik kepentingan dan persepsi publik yang buruk. Herman & Abbas, (2024) menyoroti bahwa koneksi politik dapat memperburuk dampak negatif penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan, yang merugikan perusahaan dalam jangka panjang.

Di sisi lain, penghindaran pajak merupakan strategi yang sering digunakan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan laba bersih dengan mengurangi kewajiban pajak (Khan et al. 2020). Praktik ini memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan laba, namun juga menimbulkan risiko reputasi dan konflik kepentingan. Ketika penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang tidak etis oleh publik, hal ini dapat menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan dan memperburuk citra perusahaan (Shubita, 2024). Dalam konteks keberlanjutan, praktik ini bertentangan dengan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan yang mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi secara adil terhadap pembangunan negara (Amini et al., 2024).

Penelitian mengenai penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dilakukan oleh Amini et al. (2024), mengungkapkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya semakin tinggi nilai penghindaran pajak, perusahaan menahan lebih banyak uang tunai yang dapat digunakan untuk deviden atau investasi lainnya sehingga semakin tinggi pula nilai perusahaan. Shidqi et al., (2024), menunjukkan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Investor memandang tindakan ini sebagai upaya efisiensi yang meningkatkan laba bersih dan mencerminkan

pengelolaan keuangan yang efektif. Sejalan dengan enelitian Cahyono & Ardianto, (2024); Mangoting et al., (2020) mendukung pandangan ini menunjukkan bahwa *tax avoidance* dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Sedangkan pada penelitian Khan et al. (2020) menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Shubita, (2024) menemukan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, terutama jika perusahaan memiliki leverage yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat menurunkan kepercayaan pasar, meningkatkan risiko reputasi, dan memperburuk persepsi stakeholder. Penelitian Herman & Abbas, (2024) juga menunjukkan bahwa *tax avoidance* dapat menurunkan nilai perusahaan, terutama jika disertai dengan praktik-praktik yang kurang transparan seperti koneksi politik.

Penelitian mengenai *Corporate Governance* sebagai variabel moderasi hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan dilakukan oleh Khan et al. (2020) yang menunjukkan hasil bahwa *Corporate Governance* berperan positif dalam mengurangi hubungan negatif antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Sedangkan dalam penelitian Budiman & Fitriana (2021) menyatakan bahwa *corporate governamce* tidak dapat berperan sebagai moderasi antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen (agen), di mana konflik kepentingan dapat muncul karena perbedaan tujuan antara keduanya (M. C. Jensen & Meckling, 1976). Koneksi politik dapat dimanfaatkan manajemen untuk mendapatkan keuntungan pribadi

atau jangka pendek, yang mungkin tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham dan berisiko merugikan perusahaan dalam jangka Panjang (Momon et al., 2021). Penghindaran pajak juga dapat menciptakan konflik kepentingan, di mana manajemen mungkin memilih strategi yang menguntungkan secara sementara namun berisiko merusak reputasi perusahaan (Budiman & Fitriana, 2021). Komisaris independen perusahaan yang baik berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang dapat mengurangi konflik keagenan, memastikan bahwa koneksi politik dan penghindaran pajak dijalankan dengan transparansi dan bertanggung jawab (Alhady et al., 2021).

Leverage dan ukuran perusahaan (*firm size*) untuk mengendalikan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi nilai perusahaan. Leverage diukur menggunakan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER), yang menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan pembiayaan berbasis utang dalam struktur modalnya. Tingkat leverage yang tinggi dapat memengaruhi persepsi risiko investor dan berdampak pada nilai perusahaan (Khairunnisa & Angyani, 2024). Ukuran perusahaan diukur dengan *logaritma natural* dari total aset, yang merefleksikan kapasitas operasional, skala ekonomi, dan kemampuan perusahaan mengakses sumber daya (Natsir & Yusbardini, 2019).

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan memasukkan *tax avoidance* sebagai variabel independen dan komisaris independen sebagai variabel moderasi, yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya yaitu penelitian (Ika et al., 2021). Penambahan variabel *tax avoidance* memberikan perspektif baru terkait praktik penghindaran pajak yang semakin relevan dalam strategi perusahaan

modern, terutama dalam kaitannya dengan nilai perusahaan dan persepsi risiko. *Tax avoidance* sering digunakan untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan profitabilitas perusahaan, namun praktik ini juga memiliki risiko reputasional dan berpotensi memengaruhi persepsi pemangku kepentingan terhadap perusahaan.

Selain itu, alasan menambahkan komisaris independen dengan indikator proporsi komisaris independen sebagai variabel moderasi bertujuan untuk memastikan bahwa Keputusan yang diambil oleh dewan adalah objektif, bebas dari pengaruh yang tidak semestinya, dan lebih mengutamakan kepentingan pemegang saham secara keseluruhan, selain itu untuk mengukur sejauh mana dewan komisaris memiliki independensi yang cukup untuk mengawasi praktik yang dapat merugikan perusahaan, seperti penghindaran pajak atau penyalahgunaan koneksi politik dan dapat mendukung peningkatan nilai perusahaan.

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan menggunakan populasi perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang banyak berfokus pada sektor industri lain atau negara lain. Sektor keuangan, yang mencakup perbankan, asuransi, dan pembiayaan, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kebijakan pemerintah dan pengawasan ketat dari otoritas keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keterkaitan ini menjadikan perusahaan di sektor keuangan lebih rentan terhadap pengaruh politik, karena izin operasi, peraturan, dan persyaratan kepatuhan sering kali membutuhkan hubungan yang baik dengan regulator dan pemerintah.

## 1.2 Rumusan Masalah

Penelitian mengenai pengaruh koneksi politik dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan telah menunjukkan hasil yang beragam dan belum konklusif. Beberapa studi seperti Pratama & Setiawan (2019) serta Cahyono & Ardianto (2024) menemukan bahwa koneksi politik berdampak positif terhadap nilai perusahaan karena memberikan akses istimewa terhadap kebijakan dan proyek pemerintah. Namun, temuan ini berlawanan dengan hasil Supatmi et al. (2021) dan Efendi et al. (2022) yang menunjukkan pengaruh negatif koneksi politik, terutama karena risiko konflik kepentingan dan penurunan kepercayaan investor. Demikian pula, penghindaran pajak ditemukan memiliki pengaruh positif oleh Amini et al. (2024) dan Shidqi et al. (2024), sementara Khan et al. (2020) dan Shubita (2024) menyatakan sebaliknya, bahwa praktik ini justru merugikan nilai perusahaan akibat risiko reputasi dan sanksi hukum.

Selain itu, peran komisaris independen sebagai variabel moderasi juga belum memperoleh kesimpulan yang seragam. Khan et al. (2020) menyatakan bahwa *corporate governance* mampu memitigasi dampak negatif penghindaran pajak, sedangkan Budiman & Fitriana (2021) menyimpulkan bahwa mekanisme tersebut tidak efektif sebagai moderasi. Dalam konteks koneksi politik, studi oleh Ika et al. (2021) menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen memperkuat pengaruh positif koneksi politik terhadap nilai perusahaan, tetapi temuan Idris et al. (2020) menyebut komisaris independen tidak memberikan dampak signifikan. Perbedaan hasil ini menandakan adanya celah penelitian yang penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya pada sektor keuangan di Indonesia yang memiliki

sensitivitas tinggi terhadap regulasi dan pengaruh politik. Berdasarkan uraian latar belakang dan celah penelitian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh koneksi politik (X1) terhadap nilai perusahaan (Y)?
2. Bagaimana pengaruh penghindaran pajak (X2) terhadap nilai perusahaan (Y)?
3. Apakah komisaris independen (Z) memoderasi pengaruh koneksi politik (X1) terhadap nilai perusahaan (Y)?
4. Apakah komisaris independen (Z) memoderasi pengaruh penghindaran pajak (X2) terhadap nilai perusahaan (Y)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap nilai perusahaan.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis peran komisaris independen dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh koneksi politik terhadap nilai perusahaan.
4. Mendeskripsikan dan menganalisis peran komisaris independen dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat bagi Akademik**

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori dan literatur mengenai koneksi politik, penghindaran pajak, serta peran komisaris independen dalam konteks nilai perusahaan, khususnya pada sektor keuangan di Indonesia. Temuan dari penelitian ini memperkaya kajian akademik dengan menghadirkan bukti empiris dari negara berkembang, yang memiliki karakteristik tata kelola perusahaan dan dinamika politik yang berbeda dari negara maju. Selain itu, penelitian ini mendukung pengujian teori keagenan (*agency theory*) dan teori sinyal (*signaling theory*), khususnya dalam memahami bagaimana manajemen menggunakan strategi tertentu yang dapat memengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan mahasiswa untuk mengembangkan studi lanjutan di bidang keuangan dan tata kelola perusahaan, baik pada sektor lain maupun dalam periode waktu yang berbeda.

### **1.4.2 Manfaat bagi Praktik**

Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi manajemen perusahaan dalam membuat keputusan strategis, khususnya terkait pemanfaatan koneksi politik dan strategi penghindaran pajak agar tetap selaras dengan kepentingan jangka panjang perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini menekankan pentingnya peran komisaris independen dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif guna menjaga reputasi dan meningkatkan nilai perusahaan. Bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya, temuan dari penelitian ini dapat

menjadi dasar dalam mengevaluasi risiko yang mungkin timbul akibat praktik koneksi politik atau penghindaran pajak. Tidak hanya itu, regulator atau pembuat kebijakan juga dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai masukan dalam merancang kebijakan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, khususnya dalam memperkuat peran komisaris independen di sektor keuangan. Secara keseluruhan, penelitian ini turut mendorong penerapan prinsip pengelolaan yang beretika dan berkelanjutan di lingkungan bisnis Indonesia.



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Agency Theory

Teori *Agency* adalah salah satu teori penting dalam studi manajemen, keuangan, dan ekonomi yang mengkaji hubungan antara prinsipal (pemilik atau pemegang saham) dan agen (manajemen atau pihak yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan). Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Jensen & Meckling, (1976) dalam artikel mereka yang berjudul "*Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure.*" Teori ini memberikan pemahaman mengenai permasalahan yang muncul ketika ada pemisahan antara pemilik dan pengelola perusahaan, yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Eisenhardt (1989) memperluas pemahaman ini dengan mengemukakan bahwa ketidakpastian informasi dan ketidakpastian tindakan agen adalah dua sumber utama konflik dalam hubungan prinsip (Kholid & Rahmawati, 2023).

Teori *agency* berfokus pada konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara prinsipal dan agen. Dalam hal ini, pemegang saham atau pemilik perusahaan (prinsipal) memiliki tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, sedangkan manajer (agen) yang mengelola perusahaan mungkin memiliki kepentingan yang berbeda, seperti mempertahankan kekuasaan,

menghindari risiko, atau mengoptimalkan keuntungan pribadi (seperti bonus atau kompensasi yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemegang saham) (Momon et al., 2021). Koneksi politik dan penghindaran pajak dapat menjadi saluran bagi manajer untuk mengejar kepentingan pribadi mereka, yang bisa berisiko merugikan pemegang saham.

Tata kelola perusahaan yang baik, sebagai bagian dari teori *agency*, berfungsi untuk mengurangi *agency costs* yang timbul akibat konflik kepentingan ini (Khairunnisa & Angyani, 2023). Dalam penelitian ini, komisaris independen dapat berperan dalam memoderasi dampak negatif dari penghindaran pajak dan koneksi politik terhadap nilai perusahaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang kuat seperti dewan direksi yang independen, komite audit yang efektif, serta transparansi dan akuntabilitas yang tinggi perusahaan dapat lebih memastikan bahwa manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan perusahaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

### **2.1.2 Nilai Perusahaan**

Pendirian perusahaan dilakukan dengan tujuan yang jelas. Ada beberapa alasan yang mendasari tujuan tersebut (Cahyono & Ardianto, 2024). Pertama, perusahaan bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan secara maksimal. Kedua, perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik atau pemegang sahamnya. Ketiga, perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, yang biasanya tercermin

melalui harga saham. Meskipun tujuan-tujuan tersebut memiliki kesamaan, setiap perusahaan memiliki fokus yang berbeda-beda dalam pencapaiannya.

Nilai perusahaan mencerminkan persepsi pasar terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan, baik dari segi operasional maupun prospek ke depan. Menurut Widarjo et al., (2021), nilai perusahaan adalah nilai ekonomi yang dihasilkan oleh perusahaan dan digunakan sebagai indikator keberhasilan manajemen dalam mengelola sumber daya. Nilai ini sering kali diukur melalui kapitalisasi pasar, yaitu harga saham perusahaan dikalikan dengan jumlah saham yang beredar.

Menurut Brigham & Houston, (2019) Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar karena nilai Perusahaan dapat memberikan kemakmuran bagi pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan bertambah. Berbagai kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik serta para pemegang saham yang tercermin pada harga saham. Nilai perusahaan merupakan penjumlahan dari nilai sekarang dari arus kas masa depan yang dihasilkan oleh aktiva lancar perusahaan ditambah dengan proyek investasi potensial. Nilai saham saat ini tidak hanya mencerminkan kapasitas perolehan laba saat ini tetapi juga mencerminkan ekspektasi kinerja operasi dan investasi di masa depan (Momon et al., 2021).

Secara umum, tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Hal ini tercermin dalam peningkatan harga saham, pembagian dividen yang konsisten, serta kemampuan perusahaan untuk

menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Nilai perusahaan juga berkaitan erat dengan keberlanjutan perusahaan di masa depan, karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan memenuhi ekspektasi pasar. Nilai perusahaan dapat diukur menggunakan berbagai indikator:

1. *Price Earning Ratio* (PER)

*Price Earning Ratio* merupakan penilaian investor dan calon investor terhadap laba masa depan perusahaan. Investor dapat menggunakan rasio ini untuk memilih saham mana yang nantinya dapat memberikan keuntungan besar di masa depan. Perusahaan dengan kemungkinan pertumbuhan yang tinggi biasanya memiliki PER yang tinggi, sedangkan perusahaan dengan pertumbuhan yang rendah biasanya memiliki PER yang rendah. Jika tingkat pertumbuhan perusahaan tinggi maka pada umumnya return yang diberikan perusahaan kepada investornya tinggi sehingga hal ini akan menarik minat investor sehingga harga saham akan naik (Brigham & Houston, 2019).

2. *Price To Book Value* (PBV)

*Price to book value* (PBV) adalah rasio penilaian atau sering disebut sebagai rasio penilaian untuk menilai biaya atau murahness suatu saham dengan membandingkan harga saham dengan nilai buku Perusahaan (Brigham & Houston, 2019).

### 3. *Tobins'q*

Dimana rasio ini dianggap memberikan kualitas karena dalam *tobin's Q* mencakup semua faktor hutang perusahaan dan persentase modal, belum lagi saham biasa yang terbaik dan bukan lagi ekuitas pemberi kerja yang paling efektif. tetapi juga semua bisnis properti perusahaan. Melalui usaha properti yang mencakup seluruh perusahaan, pendekatan bahwa organisasi tidak selalu berpusat pada satu jenis investor, yaitu investor dalam bentuk saham tetapi juga kepada pemberi pinjaman, karena penyediaan pembiayaan untuk operasional organisasi tidak ekuitas yang paling efektif tetapi juga pinjaman yang diberikan melalui kreditur (Brigham & Houston, 2019).

#### 2.1.3 Koneksi Politik

Koneksi politik sebagai konsep telah menjadi perhatian dalam kajian ekonomi dan manajemen sejak beberapa dekade terakhir. Koneksi politik mengacu pada hubungan antara perusahaan dengan individu atau institusi yang memiliki pengaruh politik. Menurut Hardiningsih et al., (2024), suatu perusahaan dapat dikatakan memiliki hubungan politik jika setidaknya salah satu pemegang saham mayoritas (orang yang menguasai setidaknya 10 persen dari total saham dengan hak suara) atau salah satu direktur perusahaan adalah anggota parlemen atau orang yang berafiliasi dekat dengan politisi atau partai politik papan atas.

Pratama & Setiawan, (2019) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan politik adalah perusahaan atau konglomerat yang

memiliki hubungan dekat dengan pemerintah. Koneksi politik merujuk pada hubungan istimewa yang dimiliki oleh perusahaan dengan pemerintah atau partai politik, yang dapat memberikan berbagai hak istimewa, seperti kemudahan dalam mendapatkan pinjaman dan risiko pemeriksaan pajak yang rendah (Efendi et al., 2022).

Koneksi politik mengacu pada hubungan yang terjalin antara perusahaan dan aktor politik, seperti pejabat pemerintah, regulator, atau partai politik, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan strategis dalam operasional bisnis (Eissa & Eliwa, 2021). Hubungan ini dapat terjalin melalui berbagai cara, termasuk penempatan individu dengan latar belakang politik dalam struktur organisasi perusahaan, kontribusi perusahaan terhadap kampanye politik, atau kolaborasi dengan entitas politik tertentu (Hardiningsih et al., 2024). Dalam literatur, koneksi politik sering diukur berdasarkan kehadiran mantan pejabat publik dalam dewan direksi perusahaan, keterlibatan pemilik perusahaan dalam aktivitas politik, atau akses istimewa perusahaan terhadap kebijakan pemerintah.

Dalam dunia bisnis, koneksi politik sering dimanfaatkan untuk mengakses peluang ekonomi yang eksklusif, seperti kontrak pemerintah, insentif pajak, pendanaan murah, atau perlakuan regulasi yang menguntungkan (Ika et al., 2021). Koneksi ini menjadi semakin relevan di negara-negara dengan regulasi yang kompleks atau lembaga yang belum sepenuhnya matang, di mana hubungan pribadi sering kali lebih berpengaruh dibandingkan dengan transparansi pasar.

Variabel koneksi politik umumnya diukur dengan beberapa cara yang disesuaikan dengan tujuan penelitian serta ketersediaan data. Pengukuran ini penting karena koneksi politik dianggap dapat memberikan keuntungan tertentu bagi perusahaan, seperti akses pendanaan, kemudahan regulasi, atau perlindungan dari tekanan eksternal. Adapun beberapa metode pengukuran koneksi politik yang sering digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Pengukuran *Dummy Variable***

Koneksi politik dapat diukur menggunakan variabel *dummy*, yaitu memberikan nilai 1 jika perusahaan memiliki hubungan politik dan 0 jika tidak memiliki hubungan politik. Hubungan politik biasanya diidentifikasi ketika anggota dewan direksi, komisaris, atau pemegang saham pengendali pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat pemerintah, anggota legislatif, menteri, atau memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat publik. Pengukuran dengan *dummy* ini sederhana dan paling banyak digunakan karena memudahkan klasifikasi perusahaan ke dalam dua kelompok, yaitu yang memiliki koneksi politik dan yang tidak.

### **2. Proporsi Dewan Berpolitik**

Selain *dummy*, koneksi politik juga bisa diukur dengan menghitung proporsi anggota dewan yang memiliki jabatan politik terhadap total anggota dewan perusahaan. Rumusnya adalah jumlah anggota dewan berpolitik dibagi dengan total anggota dewan. Pendekatan ini memberikan gambaran lebih detail mengenai seberapa

besar pengaruh politik dalam struktur tata kelola perusahaan, sehingga semakin besar proporsinya maka semakin kuat indikasi koneksi politik yang dimiliki perusahaan.

### **3. Kepemilikan Saham oleh Pihak Berpolitik**

Metode lain adalah mengukur koneksi politik melalui kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak-pihak berpolitik. Rumusnya adalah jumlah saham yang dimiliki oleh individu atau institusi yang terkait politik dibagi dengan total saham beredar. Semakin besar persentase kepemilikan saham tersebut, semakin kuat pula koneksi politik yang dimiliki perusahaan. Cara ini menunjukkan keterkaitan politik dari sisi kontrol kepemilikan, bukan hanya dari komposisi dewan.

### **4. Indeks Koneksi Politik**

Selain menggunakan dummy, proporsi dewan, dan kepemilikan saham, koneksi politik juga dapat diukur dengan membangun indeks koneksi politik. Indeks ini disusun dengan memberikan skor pada beberapa indikator, misalnya keberadaan anggota dewan atau komisaris yang memiliki jabatan politik, kepemilikan saham oleh pihak berpolitik, serta adanya hubungan keluarga dengan pejabat publik. Skor dari masing-masing indikator kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai indeks koneksi politik perusahaan. Semakin tinggi skor indeks, semakin kuat tingkat koneksi politik yang dimiliki perusahaan.

Pendekatan ini lebih komprehensif karena menggabungkan berbagai aspek koneksi politik, bukan hanya melihat dari satu sisi saja.

#### 2.1.4 Penghindaran Pajak

*Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan salah satu strategi yang sering digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan (Azam & Wang, 2020). Praktik ini dilakukan dengan memanfaatkan celah atau ketidakjelasan dalam peraturan perpajakan, sehingga perusahaan dapat mengurangi jumlah pajak secara legal namun tidak sesuai dengan semangat hukum. Meski sering dianggap sebagai tindakan legal, penghindaran pajak dapat menimbulkan kontroversi, terutama jika berdampak pada penerimaan negara atau dianggap merugikan kepentingan publik.

Menurut Khan et al., (2020), *tax avoidance* adalah segala aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal, mulai dari perencanaan pajak yang konservatif hingga strategi agresif yang melibatkan interpretasi aturan perpajakan. Amini et al., (2024), Penghindaran pajak mencakup semua upaya manajemen untuk menurunkan kewajiban pajak, termasuk melalui pengaturan akuntansi atau transaksi keuangan yang kompleks namun masih dalam batas legal. Menurut Alhady et al., (2021) Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak dalam hal metodenya. Penghindaran pajak merupakan pengaturan transaksi yang menguntungkan pajak dengan memanfaatkan peluang yang ada dalam peraturan perpajakan dan bukan melawan peraturan tersebut, sedangkan penggelapan pajak

merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja dalam arti melawan hukum dengan tujuan yang sama yaitu menghindari pembayaran pajak.

*Tax avoidance* menjadi salah satu variabel penting dalam studi keuangan dan perpajakan karena relevansinya terhadap kebijakan fiskal dan strategi manajemen perusahaan. Perusahaan biasanya melakukan penghindaran pajak untuk mencapai efisiensi biaya, meningkatkan laba bersih, dan menjaga daya saing di pasar. Strategi ini sering melibatkan perencanaan pajak (*tax planning*), yang mencakup pengelolaan struktur modal, lokasi usaha, serta pengaturan transaksi lintas batas. Penghindaran pajak dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme (Irawan et al., 2020), antara lain:

1. *Transfer Pricing*: Pengaturan harga dalam transaksi antarperusahaan yang berada dalam satu grup untuk meminimalkan pajak di negara dengan tarif pajak tinggi.
2. *Thin Capitalization*: Penggunaan utang yang tinggi dibandingkan modal ekuitas untuk mendapatkan pengurangan pajak dari beban bunga.
3. *Tax Treaty Shopping*: Pemanfaatan perjanjian pajak antarnegara untuk mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah.
4. *Deferral of Taxes*: Penundaan pembayaran pajak melalui strategi tertentu, seperti penggunaan aset tak berwujud di yurisdiksi pajak rendah.

Penghindaran pajak dapat diukur dengan berbagai metode, yang masing-masing dikembangkan untuk menggambarkan sejauh mana

perusahaan mengurangi kewajibannya. Berikut adalah beberapa pengukuran yang umum digunakan.

1. *Effective Tax Rate* (ETR)

*Tax Rate* (ETR) adalah salah satu pengukuran yang paling umum digunakan dalam studi terkait *tax avoidance*. Hanlon dan Heitzman (2010) ETR yang rendah dapat menunjukkan adanya penghindaran pajak karena perusahaan membayar pajak lebih rendah daripada tarif pajak yang seharusnya. ETR dianggap sebagai ukuran yang konservatif karena hanya memperlihatkan hasil akhir dari beban pajak tanpa memperhatikan metode yang digunakan (Khan et al. 2020). Pengukuran ini menggunakan rasio ETR (*Effective Tax Rate*) yang dihitung dengan membagi beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak. Jika ETR lebih kecil dibandingkan tarif pajak efektif yang berlaku, ini menunjukkan adanya strategi penghindaran pajak.

2. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

Mengukur penghindaran pajak berdasarkan pajak yang dibayar dalam bentuk tunai, bukan berdasarkan akrual. CETR memberikan gambaran yang lebih mendekati realitas karena memperhitungkan pembayaran pajak tunai yang sebenarnya dikeluarkan perusahaan, sehingga dapat mencerminkan strategi penghindaran pajak secara lebih akurat (Dyrenge et al., 2017). CETR yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan strategi untuk menunda atau mengurangi pembayaran pajak secara efektif. CETR mengukur beban pajak yang

benar-benar dibayarkan dalam bentuk kas dibandingkan dengan laba sebelum pajak (Khairunnisa & Angyani, 2023).

### 3. *Book Tax Difference* (BTD)

*Book-Tax Differences* (BTD) mengukur perbedaan antara laba akuntansi yang dilaporkan dalam laporan keuangan (*book income*) dengan laba yang dilaporkan untuk keperluan perpajakan (*taxable income*). Menurut Mills (1998) dalam Shubita, (2024), semakin besar BTD yang dimiliki perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance*. Metode ini sering digunakan untuk mengidentifikasi perusahaan yang memanfaatkan perbedaan prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan dalam pelaporan laba dan kewajiban pajak. BTD diukur menggunakan selisih antara laba akuntansi yang dilaporkan kepada pemegang saham dengan laba kena pajak yang dilaporkan ke otoritas pajak. Selisih yang besar dapat menunjukkan adanya strategi penghindaran pajak (Mangoting et al., 2020).

#### **2.1.5 Komisaris Independen**

Keberadaan komisaris independen terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan akan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG). Definisi komisaris independen pertama kali dirumuskan secara formal dalam Cadbury, (2000), yang merupakan hasil kerja *Cadbury Committee*. Komite ini dibentuk oleh pemerintah Inggris untuk

meningkatkan praktik tata kelola perusahaan setelah serangkaian skandal keuangan di akhir 1980-an dan awal 1990-an (Merendino & Melville, 2019).

Cadbury, (2000), yang merekomendasikan adanya direktur independen sebagai mekanisme pengawasan untuk mencegah konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Sejak itu, banyak negara mengadopsi prinsip ini, dengan berbagai penyesuaian sesuai konteks lokal. Fama dan Jensen (1983) dalam Ika et al., (2021), dalam kerangka *Agency Theory*, mengidentifikasi komisaris independen sebagai mekanisme pengendalian eksternal yang dapat mengurangi konflik keagenan antara manajemen dan pemegang saham.

Komisaris independen merupakan elemen penting dalam struktur tata kelola perusahaan modern (Shidqi et al., 2024). Mereka adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pemegang saham mayoritas, direksi, atau pihak lain yang dapat memengaruhi independensi mereka. Keberadaan komisaris independen diatur secara regulasi di banyak negara, termasuk Indonesia, untuk memastikan pengawasan yang objektif dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan.

Di Indonesia, perkembangan komisaris independen dimulai dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang diperkenalkan melalui berbagai regulasi, seperti Keputusan Menteri BUMN dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 menetapkan bahwa perusahaan publik wajib memiliki setidaknya 30% komisaris independen dari total anggota dewan komisaris (Budiman &

Fitriana, 2021). Aturan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mendorong akuntabilitas. Komisaris independen juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), termasuk akuntabilitas, transparansi, kewajaran, dan tanggung jawab.

Dalam praktiknya, komisaris independen memiliki tugas utama sebagai pengawas kebijakan strategis yang dibuat oleh manajemen. Mereka juga bertindak sebagai pelindung kepentingan pemegang saham minoritas, memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh manajemen tidak hanya menguntungkan pemegang saham mayoritas (Supatmi et al., 2021).

Pengukuran komisaris independen biasanya dilakukan dengan mengacu pada persentase atau proporsi komisaris independen dalam struktur dewan komisaris sebuah perusahaan. Pengukuran ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan mematuhi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan memastikan adanya pengawasan yang objektif dalam pengelolaan perusahaan. Pengukuran ini dilakukan dengan menghitung persentase jumlah komisaris independen dibandingkan dengan total jumlah anggota dewan komisaris (Shidqi et al., 2024).

#### **2.1.6 Leverage**

Leverage merupakan salah satu konsep penting dalam manajemen keuangan yang berkaitan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Konsep ini mencerminkan sejauh mana perusahaan memanfaatkan sumber pembiayaan eksternal, khususnya utang, untuk mendanai aset dan

operasionalnya (Brigham & Houston, 2019). Penggunaan leverage menjadi bagian dari strategi struktur modal, di mana manajemen perlu menyeimbangkan manfaat pendanaan utang seperti ketersediaan dana tambahan dan potensi penghematan pajak dengan risiko yang timbul seperti kewajiban pembayaran bunga dan potensi kebangkrutan (C. Jensen & Meckling, 1976). Dalam praktiknya, leverage sering digunakan untuk meningkatkan kapasitas investasi tanpa harus menambah modal dari pemegang saham, sehingga dapat memaksimalkan pemanfaatan modal yang tersedia (Natsir & Yusbardini, 2019).

Brigham & Houston (2019) mendefinisikan leverage sebagai penggunaan dana yang berasal dari pinjaman untuk membiayai aset perusahaan, di mana penggunaan utang ini dapat memberikan manfaat berupa penghematan pajak dari beban bunga. Jensen & Meckling (1976) memandang leverage sebagai bagian dari struktur modal yang mencerminkan proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari kewajiban, sehingga berimplikasi pada hubungan kontraktual antara pemegang saham dan kreditor. Khairunnisa & Angyani, (2024) menjelaskan leverage sebagai perbandingan antara total utang dengan total ekuitas, yang digunakan untuk menunjukkan struktur pembiayaan perusahaan. Shubita, (2024) menyebut leverage sebagai tingkat ketergantungan perusahaan pada pendanaan berbasis utang yang diukur dengan rasio keuangan tertentu seperti *Debt to Equity Ratio* (DER). Sementara itu, Natsir & Yusbardini, (2019) menggambarkan leverage sebagai

komponen struktur modal yang menunjukkan kombinasi antara utang dan modal sendiri dalam membiayai operasi perusahaan.

### 2.1.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah gambaran besar kecilnya suatu entitas bisnis yang biasanya diukur berdasarkan total aset, total penjualan, atau jumlah karyawan. Brigham & Houston, (2019) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau besaran perusahaan yang dilihat dari total aset yang dimiliki, yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasi dan memenuhi kewajiban. Natsir & Yusbardini, (2019) menjelaskan ukuran perusahaan sebagai besaran yang menunjukkan kapasitas ekonomi dan sumber daya yang dimiliki perusahaan, yang umumnya diukur melalui logaritma natural dari total aset untuk mengurangi bias akibat perbedaan skala antar perusahaan.

Khairunnisa & Angyani, (2024) mengartikan ukuran perusahaan sebagai total aset yang dimiliki suatu perusahaan pada periode tertentu, yang digunakan untuk merepresentasikan struktur dan kapasitas operasionalnya. Fajriah et al., (2022) menyatakan ukuran perusahaan sebagai tingkat besar kecilnya perusahaan yang dapat mempengaruhi fleksibilitas dan kemampuan dalam mengakses pendanaan maupun melaksanakan kebijakan perusahaan. Hardiningsih et al. (2024), adalah dengan menggunakan *logaritma natural* dari total aset untuk menstabilkan distribusi dan memungkinkan perbandingan antar perusahaan dengan skala berbeda. Secara sintesis, ukuran perusahaan adalah konstruk multidimensi yang mencerminkan skala,

kapasitas, informasi, dan konteks strategis yang perlu dikontrol dalam analisis nilai perusahaan agar efek variabel utama tidak tercampur dengan efek struktur entitas itu sendiri.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berperan penting dalam memberikan landasan teoritis dan empiris bagi penelitian ini. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama peneliti & Nama Jurnal	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
1	Cahyono & Ardianto, (2024) <i>Intellectual Capital, Political Connection, and Firm Performance: Exploring from Indonesia</i>	<b>Dependen:</b> Y : <i>Firm Performance</i>  <b>Independen :</b> X : <i>Intellectual Capital (IC)</i>  <b>Moderasi:</b> Z : <i>Political Connection</i>	<b>Populasi:</b> 1.151 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2018–2022). <b>Teknik Analisis:</b> Regresi efek tetap dengan moderasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modal intelektual memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan.</li> <li>• Koneksi politik memperkuat hubungan antara modal intelektual dan kinerja perusahaan.</li> </ul>
2	Eissa & Eliwa, (2021) <i>The effect of political connections on firm performance: evidence from Egypt</i>	<b>Dependen :</b> Y : <i>Firm Performance (profitability and market value)</i>  <b>Independen :</b> X1 : Koneksi politik melalui	<b>Populasi:</b> 71 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Mesir (EGX), dengan total	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PC1 (Eksekutif Puncak): Tidak signifikan untuk profitabilitas, tetapi signifikan positif terhadap nilai pasar perusahaan.</li> <li>• PC2 (Pemilik Bisnis): Tidak signifikan untuk profitabilitas maupun nilai pasar.</li> </ul>

		eksekutif puncak (PC1) X2 : pemilik bisnis (PC2) X3 : kepemilikan pemerintah (PC3).	284 observasi tahun <b>Teknik Analisis :</b> Regresi OLS dan analisis moderasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PC3 (Kepemilikan Pemerintah): Signifikan positif terhadap profitabilitas dan nilai pasar perusahaan.</li> </ul>
3	Efendi et al., (2022)  <i>Firm Value and Firm Performance with Political Connections</i>	<b>Dependen :</b> Y : <i>Firm value</i>  <b>Independen :</b> X1 : Koneksi politik X2 : struktur kepemilikan.	<b>Populasi:</b> Perusahaan dalam LQ-45 (2014-2018).  <b>Teknik Analisis :</b> <i>Sobel test</i> untuk pengaruh tidak langsung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koneksi politik memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan secara langsung.</li> <li>• koneksi politik berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan perusahaan</li> </ul>
4	Supatmi et al., (2021)  <i>Abnormal related party transactions, political connection, and firm value: Evidence from indonesian firms</i>	<b>Dependen :</b> Y : <i>Firm Value</i>  <b>Independen :</b> X1 : <i>Abnormal Related Party Transactions (RPTs)</i> X2 : <i>Political Connection</i>	<b>Populasi:</b> 450 perusahaan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2014–2017 (1.724 observasi tahunan)  <b>Teknik Analisis :</b> Panel data regression dengan <i>Random Effect Model</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transaksi abnormal RPT yang terkait dengan piutang dan utang memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.</li> <li>• Abnormal RPT pada kategori non-piutang dan non-utang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.</li> <li>• Koneksi politik memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.</li> </ul>
5	Momon et al., (2021)  <i>The role of political</i>	<b>Dependen :</b> Y : <i>Firm Value</i>  <b>Independen :</b>	<b>Populasi:</b> 30 perusahaan manufaktur di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Political connections</i> memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.</li> </ul>

	<i>connections and family ownership in increasing firm value</i>	X : <i>Political connections</i> X2 : <i>Family ownership</i>	yang terdaftar di BEI selama periode 2005–2017.  <b>Teknik Analisis :</b> <i>Moderated Regression Analysis</i> dengan <i>Common Effect Model (General Least Square)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Kepemilikan keluarga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.</li> <li>•Koneksi politik memperkuat pengaruh positif kepemilikan keluarga terhadap nilai perusahaan.</li> </ul>
6	Pratama & Setiawan, (2019)  <i>Political Connection and Firm Value in Indonesia</i>	<b>Dependen :</b> Y : <i>Firm value</i>  <b>Independen :</b> X : <i>Political connections</i>	<b>Populasi:</b> 272 perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari 414 populasi awal.  <b>Teknik Analisis :</b> Analisis regresi linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Koneksi politik memiliki pengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan</li> </ul>
7	Hardiningsih et al., (2024)  <i>How does environmental, social, governance disclosure and political connection performance</i>	<b>Dependen :</b> Y : <i>Firm value</i>  <b>Independen :</b> X1 : <i>Environmental , social, governance disclosure</i> X2 : <i>Political connection</i>	<b>Populasi:</b> 87 perusahaan di Singapore <i>Stock Exchange</i> (2018-2021).  <b>Teknik Analisis :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Disclosure ESG memiliki pengaruh positif terhadap nilai Perusahaan.</li> <li>•koneksi politik memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.</li> </ul>

	<i>affect firm value? An empirical study in Singapore</i>		Regresi data panel.	
8	Ika et al., (2021)  <i>Political Connection, Corporate Governance, and Firm Value: Indonesian Evidence</i>	<b>Dependen :</b> Y : <i>Firm value</i>  <b>Independen :</b> X1 : <i>Political Connection</i> X2 : <i>Corporate Governance</i>	<b>Populasi:</b> 34 perusahaan (17 BUMN dan 17 swasta) di Indonesia (2013-2017).  <b>Teknik Analisis :</b> <i>Moderated regression analysis.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koneksi politik melalui komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.</li> <li>• <i>Corporate governance</i> sebagai variabel moderasi memperkuat hubungan positif antara koneksi politik dan nilai perusahaan</li> </ul>
9	Kholid & Rahmawati, (2023)  <i>Does Executive Compensation Reinforce the Influence of Political Connection and Investment Opportunity Set on Firm Value?</i>	<b>Dependen :</b> Y : <i>Firm Value</i>  <b>Independen :</b> X1 : <i>Political connections</i> X2 : <i>Investment Opportunity Set (IOS).</i>	<b>Populasi:</b> Semua perusahaan terdaftar di BEI dari tahun 2015-2020, sampel berjumlah 1.242 observasi (205 perusahaan selama enam tahun).  <b>Teknik Analisis :</b> Regresi data panel dengan <i>Fixed Effect Model.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koneksi politik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.</li> <li>• IOS memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.</li> <li>• <i>Executive compensation</i> tidak memperkuat hubungan koneksi politik maupun IOS terhadap nilai perusahaan</li> </ul>
10	Idris et al., (2020)  <i>The role of the board of director with</i>	<b>Dependen :</b> Y : <i>Firm Value</i>  <b>Independen :</b> X1 : <i>Political connections</i>	<b>Populasi:</b> Perusahaan dalam indeks LQ-45 di Indonesia (2014-2018).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.</li> </ul>

	<i>political connection for increasing the firm value</i>	X2 : independensi dewan direksi.	<b>Teknik Analisis :</b> Panel data regression	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai perusahaan.</li> </ul>
11	Oyetunji et al., (2023)  <i>Board diversity, Political Connections and Firm value: An Empirical Evidence from Financial Firms in Nigeria)</i>	<b>Dependen :</b> Y : Firm Value  <b>Independen :</b> X1 : Board diversity (gender, nationality, ethnic diversity) X2 : Political connections	<b>Populasi:</b> 51 perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Nigerian Stock Exchange per 31 Desember 2020.  <b>Teknik Analisis :</b> Feasible Generalized Least Squares Regression.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gender diversity, board nationality, dan ethnic diversity memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.</li> <li>Koneksi politik memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan</li> </ul>
12	Khan et al., (2020)  <i>Impact of Tax Avoidance on Firm Value and the Moderating Role of Corporate Governance: Evidence From Pakistan Manufacturing Firms</i>	<b>Dependen :</b> Y : Firm Value  <b>Independen :</b> X : Tax Avoidance  <b>Moderasi :</b> Z : Corporate Governance	<b>Populasi:</b> 120 perusahaan non-keuangan di Bursa Efek Pakistan (2013–2017)  <b>Teknik Analisis :</b> Dynamic Panel Estimation (GMM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tax avoidance memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.</li> <li>Corporate Governance memitigasi dampak negatif penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan mengurangi konflik keagenan.</li> </ul>
13	Budiman & Fitriana, (2021)  <i>The Moderating</i>	<b>Dependen :</b> Y : Firm Value  <b>Independen :</b> X : Tax avoidance	<b>Populasi:</b> 188 perusahaan manufaktur di Bursa Efek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penghindaran pajak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.</li> </ul>

	<i>Role of Corporate Governance on the Relationship between Tax Avoidance and Firm Value</i>	<b>Moderasi :</b> <b>Z :</b> <i>Corporate Governance</i>	Indonesia (2016–2019). <b>Teknik Analisis :</b> <i>Multiple Linear Regression</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Corporate governance</i> tidak mampu memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dengan nilai perusahaan.</li> </ul>
14	Amini et al., (2024)  <i>The Effect of Tax Avoidance on Company Value With Managerial Ownership as a Moderation Variable in Manufacturing Companies)</i>	<b>Dependen :</b> Y : <i>Firm Value</i>  <b>Independen :</b> X : <i>Tax avoidance</i>  <b>Moderasi :</b> Z : <i>Managerial ownership</i>	<b>Populasi:</b> 32 perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (2018–2022). <b>Teknik Analisis :</b> <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.</li> <li>• Kepemilikan manajerial tidak memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan</li> </ul>
15	Sadjiarto et al., (2024)  <i>The Effect of Tax Avoidance, Esg, And Political Connection on Firm Value 2021 - 2023</i>	<b>Dependen :</b> Y : <i>Firm Value</i>  <b>Independen :</b> X1 : <i>Tax avoidance</i> X2 : <i>ESG (Environmental, Social, Governance)</i> X3 : <i>Political Connections</i>	<b>Populasi:</b> 159 observasi dari 55 perusahaan non-keuangan di BEI (2021–2023) <b>Teknik Analisis :</b> <i>Multiple Linear Regression</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tax Avoidance</i> memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.</li> <li>• ESG memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.</li> <li>• Koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.</li> </ul>

### 2.3 Kerangka Penelitian

Menurut Sekaran & Bougie, (2017), kerangka pemikiran adalah model konseptual yang menunjukkan bagaimana hubungan antar variabel dalam penelitian dibangun berdasarkan teori, logika, serta hasil penelitian terdahulu.

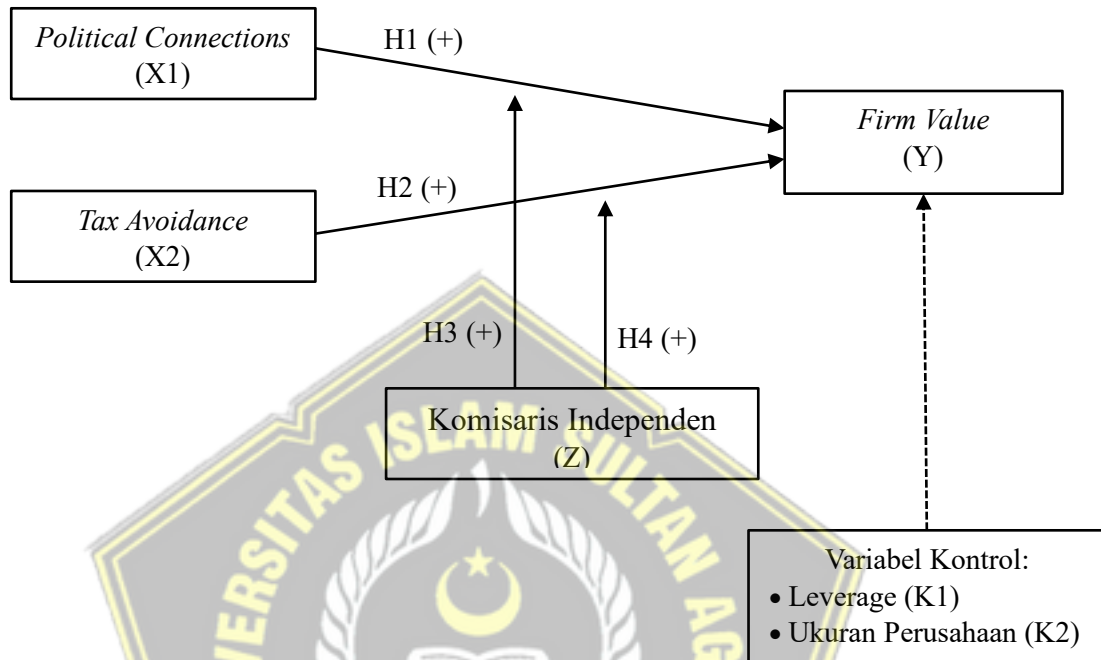
Kerangka pemikiran membantu peneliti untuk memahami secara sistematis alur pemikiran dalam menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel independen, dependen, dan moderasi.

Dalam penelitian ini, variabel independen adalah koneksi politik (X1) dan penghindaran pajak (X2), variabel dependen adalah nilai perusahaan (Y), sedangkan komisaris independen (Z) berperan sebagai variabel moderasi. Kerangka ini menggambarkan bagaimana koneksi politik dan penghindaran pajak dapat memengaruhi nilai perusahaan secara langsung, dan bagaimana komisaris independen mampu memoderasi atau mengontrol pengaruh tersebut agar sesuai dengan tujuan pemegang saham.

Penelitian ini menggunakan teori keagenan sebagai landasan utama. Teori keagenan menjelaskan adanya konflik kepentingan antara pihak manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal, yang disebabkan oleh asimetri informasi. Manajemen, sebagai pihak yang mengelola operasional perusahaan, memiliki lebih banyak informasi dan cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi, seperti memanfaatkan koneksi politik untuk memperoleh keuntungan jangka pendek atau melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan profitabilitas. Namun, kedua tindakan tersebut dapat menimbulkan risiko moral *hazard* dan berdampak negatif pada nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Dalam penelitian ini, komisaris independen berperan sebagai mekanisme pengawasan dalam tata kelola perusahaan. Komisaris independen diharapkan dapat memoderasi pengaruh koneksi politik dan penghindaran

pajak dengan memastikan kebijakan manajemen lebih transparan, akuntabel, dan sejalan dengan kepentingan pemegang saham.



**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh koneksi politik terhadap nilai perusahaan

Koneksi politik merujuk pada hubungan antara perusahaan dan individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan politik, seperti politisi atau pejabat pemerintah (Khairunnisa & Angyani, 2023). Koneksi ini dapat memberikan akses yang lebih besar kepada perusahaan untuk memperoleh kebijakan atau regulasi yang menguntungkan, mendapatkan kontrak pemerintah, atau mengurangi ketidakpastian pasar. Melalui hubungan politik yang kuat, perusahaan dapat memperoleh berbagai keuntungan, seperti informasi lebih awal mengenai perubahan kebijakan atau dukungan dalam mendapatkan izin

dan lisensi, yang akan berdampak langsung pada peningkatan profitabilitas dan nilai perusahaan (Efendi et al., 2022). Oleh karena itu, koneksi politik diyakini dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan membuka akses ke peluang yang menguntungkan dan mengurangi risiko eksternal yang mungkin muncul akibat perubahan kebijakan atau regulasi.

Dalam konteks teori *agency*, koneksi politik berperan sebagai mekanisme yang dapat mengurangi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara manajer (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) (Momon et al., 2021). Manajer yang memiliki koneksi politik dapat memanfaatkan hubungan ini untuk memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat tentang kebijakan yang berdampak pada perusahaan, serta mengurangi risiko eksternal yang dapat merugikan operasional. Hal ini membantu menyelaraskan tujuan manajer dengan kepentingan pemegang saham, karena keduanya berfokus pada peningkatan nilai perusahaan. Selain itu, koneksi politik juga dapat mengurangi biaya pengawasan dan meningkatkan reputasi perusahaan, karena perusahaan yang memiliki hubungan politik yang kuat sering kali dianggap lebih stabil dan memiliki lebih banyak peluang.

Pratama & Setiawan, (2019), menemukan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan karena memberikan akses kepada kebijakan pemerintah dan peluang proyek strategis. Cahyono & Ardianto, (2024) menunjukkan bahwa koneksi politik memperkuat hubungan antara modal intelektual dan kinerja perusahaan, yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh Supatmi et al. (2021) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Efendi et al., (2022) dan Herman & Abbas, (2024) menunjukkan bahwa koneksi politik dapat menurunkan nilai perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H1: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

#### **2.4.2 Pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai Perusahaan**

Penghindaran pajak merupakan strategi perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan melalui pemanfaatan celah dalam regulasi pajak, insentif fiskal, atau mekanisme perencanaan pajak yang agresif (Amini et al., 2024). Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan dengan mengurangi pengeluaran pajak, sehingga laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham menjadi lebih besar. Penghindaran pajak sering dianggap sebagai salah satu upaya manajemen untuk memaksimalkan nilai perusahaan, karena laba yang lebih tinggi dapat meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor dan meningkatkan harga saham di pasar modal (Widarjo et al., 2021).

Pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dapat dijelaskan melalui teori agensi, yang menggambarkan hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen (Khan et al., 2020). Menurut teori ini, manajer bertugas untuk mengelola perusahaan demi kepentingan pemegang saham, termasuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Dalam konteks penghindaran pajak, manajer dapat menggunakan

strategi ini untuk meningkatkan laba bersih dan arus kas perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Namun, efektivitas penghindaran pajak dalam memberikan manfaat bagi pemegang saham sangat bergantung pada mekanisme tata kelola perusahaan. Jika perusahaan memiliki tata kelola yang baik, penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara yang terkendali dan terukur, sehingga risikonya terhadap reputasi perusahaan, denda pajak, atau pengawasan otoritas pajak dapat diminimalkan (Mangoting et al., 2020).

Amini et al. (2024), mengungkapkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya semakin tinggi nilai penghindaran pajak, perusahaan menahan lebih banyak uang tunai yang dapat digunakan untuk deviden atau investasi lainnya sehingga semakin tinggi pula nilai perusahaan. Shidqi et al., (2024), menunjukkan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan pada penelitian Khan et al. (2020) menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Shubita, (2024) menemukan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, terutama jika perusahaan memiliki leverage yang tinggi. Penelitian Herman & Abbas, (2024) juga menunjukkan bahwa *tax avoidance* dapat menurunkan nilai perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H2: Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

### **2.4.3 Komisaris independen memoderasi hubungan koneksi politik terhadap nilai perusahaan**

Komisaris independen merupakan elemen penting dalam struktur tata kelola perusahaan yang bertugas memastikan pengelolaan perusahaan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan pemangku kepentingan (Shidqi et al., 2024). Kehadiran komisaris independen menjadi kunci dalam mengawasi kebijakan strategis manajemen, termasuk kebijakan yang melibatkan koneksi politik. Koneksi politik perusahaan sendiri mengacu pada hubungan antara perusahaan dengan individu yang memiliki kekuasaan politik, seperti pejabat pemerintah atau politisi, yang sering digunakan untuk memperoleh keuntungan kompetitif, seperti akses pendanaan yang lebih murah atau perlindungan regulasi (Cahyono & Ardianto, 2024).

Namun, koneksi politik juga membawa risiko, seperti potensi kerugian reputasi, pengawasan regulator yang ketat, atau penyalahgunaan kekuasaan. Komisaris independen dapat berperan sebagai pengendali, memastikan koneksi politik dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan secara keseluruhan, bukan untuk kepentingan pribadi manajemen. Teori agensi menjelaskan bahwa komisaris independen mampu mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dengan melakukan pengawasan yang efektif terhadap penggunaan koneksi politik (Mangoting et al., 2020).

Kehadiran komisaris independen diyakini mampu memperkuat pengaruh positif koneksi politik terhadap nilai perusahaan. Sebagai pihak yang bertugas mengawasi kebijakan manajemen, komisaris independen dapat memastikan bahwa koneksi politik digunakan secara strategis dan menguntungkan perusahaan, sekaligus meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Penelitian oleh Setiawan et al. (2019) menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang lebih tinggi cenderung memiliki nilai pasar yang lebih baik, bahkan ketika terlibat dalam koneksi politik. Namun, penelitian yang tidak sejalan ditemukan oleh Idris et al., (2020) yang menunjukkan dewan independen tidak memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan nilai perusahaan Berdasarkan tinjauan teori dan penelitian empiris, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H3: Komisaris independen memoderasi hubungan koneksi politik terhadap nilai perusahaan.

#### **2.4.4 Komisaris independen memoderasi hubungan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan**

Kehadiran komisaris independen dalam struktur tata kelola perusahaan berperan penting dalam mengawasi kebijakan penghindaran pajak agar tetap dalam batas yang wajar dan tidak membahayakan perusahaan. Komisaris independen merupakan pihak eksternal yang tidak memiliki hubungan langsung dengan perusahaan dan diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan yang objektif (Amini et al., 2024).

Berdasarkan teori agensi, komisaris independen bertindak untuk mengurangi potensi konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal). komisaris independen dapat memastikan bahwa strategi ini dilakukan secara terukur dan sejalan dengan tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan nilai tanpa menimbulkan risiko berlebihan. Penelitian Shidqi et al., (2024) menunjukkan bahwa tata kelola yang kuat, termasuk keberadaan komisaris independen, mampu memperbaiki persepsi investor terhadap perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan laba bersih perusahaan, sehingga menarik minat investor dan meningkatkan harga saham. Namun, jika penghindaran pajak dilakukan secara agresif tanpa pengawasan yang memadai, hal ini dapat merugikan perusahaan melalui denda atau kerusakan reputasi. Komisaris independen berperan sebagai pengendali yang memastikan strategi penghindaran pajak tetap terkendali dan tidak merugikan pemangku kepentingan.

Alhady et al., (2021) mengindikasikan bahwa perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang lebih tinggi cenderung memiliki nilai pasar yang lebih stabil, meskipun terlibat dalam penghindaran pajak. Khan et al. (2020) yang menunjukkan hasil bahwa *Corporate Governance* berperan positif dalam mengurangi hubungan negatif antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Budiman & Fitriana, (2021) yang menyatakan *corporate governance* tidak efektif sebagai variabel moderasi dalam hubungan penghindaran pajak dan nilai perusahaan.

Berdasarkan penjelasan teori dan bukti empiris, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H4: Komisaris independen memoderasi hubungan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sekaran & Bougie, (2017) mengemukakan bahwa “Desain penelitian merupakan rencana untuk pengumpulan, pengukuran dan analisis data berdasarkan pernyataan penelitian dari studi”. Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksplanatori (*explanatory research*) dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian eksplanatori bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang diteliti, serta bagaimana satu variabel memengaruhi variabel lainnya (Sekaran & Bougie, 2017).

Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis hubungan antara koneksi politik (X1) dan penghindaran pajak (X2) terhadap nilai perusahaan (Y), dengan komisaris independen (Z) sebagai variabel moderasi, serta leverage dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor keuangan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode pengamatan, yaitu dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Metode analisis data menggunakan *Warp PLS*, dipilih sebagai alat analisis data karena memiliki keunggulan dalam

menganalisis hubungan kausal antarvariabel dalam model berbasis *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM).

## 3.2 Populasi Dan Sampel

### 3.2.1 Populasi

Populasi diartikan sebagai seluruh kelompok orang, kejadian, atau hal yang menjadi fokus perhatian peneliti, yang ingin diteliti atau diambil kesimpulannya (Sekaran & Bougie, 2017). Populasi mencakup semua individu atau unit yang memiliki satu atau lebih karakteristik umum yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor keuangan meliputi perbankan, leasing, asuransi, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang terdaftar dalam sektor keuangan BEI dalam periode pengamatan, yaitu dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Sektor keuangan dipilih karena memiliki karakteristik yang relevan dalam hal koneksi politik, penghindaran pajak, dan komisaris independen, yang berpotensi memengaruhi nilai perusahaan.

### 3.2.2 Sampel

Sampel ini merupakan representasi dari populasi yang lebih besar, sehingga kesimpulan yang diambil dari sampel dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi. Dengan kata lain, sampel adalah bagian kecil dari populasi yang dipilih untuk mendapatkan informasi mengenai keseluruhan populasi (Sekaran & Bougie, 2017). Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* atau sampel bertujuan sebagai teknik pemilihan sampel. Kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel yang digunakan antara lain:

1. Perusahaan sektor keuangan meliputi perbankan, *leasing*, asuransi, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang terdaftar dalam sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024.
2. Perusahaan sektor keuangan mencakup sub-sektor perbankan, perusahaan pembiayaan (*leasing/multifinance*), asuransi, sekuritas, dan perusahaan investasi lainnya telah mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara lengkap selama periode penelitian.
3. Perusahaan yang memiliki data lengkap terkait variabel penelitian, yaitu koneksi politik, penghindaran pajak, komisaris independen, dan nilai perusahaan.

### **3.3 Sumber Data dan Jenis Data**

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Sekaran & Bougie, (2017), data sekunder didefinisikan sebagai data yang sudah tersedia, yang dikumpulkan untuk tujuan lain selain penelitian yang sedang dilakukan. Sumber data sekunder mencakup laporan pemerintah, arsip perusahaan, data statistik, publikasi jurnal ilmiah, atau dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sekaran & Bougie, (2017), data kuantitatif adalah data numerik yang dapat dianalisis secara statistik untuk menemukan pola atau hubungan antar variabel.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara

menggunakan jurnal-jurnal, buku-buku, studi pustaka dari berbagai literatur, serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini (Sekaran & Bougie, 2017). Data sekunder diperoleh dari *annual report* yang didapat melalui website *www.idx.co.id*, website resmi masing-masing perusahaan dan Yahoo Finance. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah metode dokumentasi. Menurut Sekaran & Bougie, (2017) dokumentasi adalah cara memperoleh pengetahuan dan informasi berupa buku, arsip, dokumen, angka tertulis dan gambar dalam bentuk laporan dan data penunjang penelitian.

### 3.5 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah proses mendefinisikan variabel penelitian dalam istilah yang dapat diukur. Ini berarti menetapkan cara variabel akan diukur, diobservasi, atau dimanipulasi dalam konteks penelitian tertentu (Sekaran & Bougie, 2017). Berikut ini merupakan ringkasan dari variabel penelitian dan indikator perhitungan yang digunakan untuk pembuatan kuesioner:

Tabel 3.1

#### Definisi Operasional dan Indikator Variabel

No.	Variabel	Definisi Operasional Variabel	Indikator
1	<i>Firm Value</i> (Y)	Nilai perusahaan adalah persepsi pasar terhadap kinerja dan prospek perusahaan di masa depan yang tercermin melalui harga saham perusahaan. Nilai ini mencerminkan sejauh	$Tobin's Q = \frac{MVS + D}{TA}$

		mana manajemen berhasil mengelola aset perusahaan untuk memberikan keuntungan kepada pemegang saham (Oyetunji et al., 2023).	
2	<i>Political Connections</i> (X1)	Koneksi politik diukur menggunakan variabel dummy, yaitu dengan memberikan nilai 1 jika perusahaan memiliki koneksi politik dan nilai 0 jika tidak memiliki koneksi politik (Kholid & Rahmawati, 2023)	<p><i>The dummy variable:</i>  <i>Having political connections</i> = 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan direksi, komisaris, atau pemegang saham pengendali pernah/masih menjabat sebagai pejabat pemerintah, anggota DPR/DPRD, menteri, atau posisi politik lainnya.</li> <li>• Adanya hubungan kekerabatan dekat dengan pejabat politik atau pemerintah.</li> <li>• Keterlibatan perusahaan dalam jaringan partai politik atau organisasi politik.</li> </ul> <p><i>Does not have political connections</i> = 0</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada direksi, komisaris, maupun pemegang saham pengendali yang berhubungan dengan pejabat politik atau pemerintah.</li> <li>• Tidak terdapat indikasi keterkaitan langsung dengan partai politik atau jabatan publik.</li> </ul>
3	<i>Tax Avoidance</i> (X2)	Penghindaran pajak adalah strategi perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar secara legal. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur dengan menggunakan <i>Cash</i>	<p><i>CETR</i>  = 1  <math display="block">- \frac{\text{Pajak yang dibayar}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}} \times 100</math></p> <p><b>Keterangan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika nilai 1 – <i>CETR</i> mendekati 1, berarti tingkat penghindaran pajak perusahaan tinggi karena</li> </ul>

		<i>Effective Tax Rate</i> (CETR), yaitu rasio antara pajak kas yang dibayar terhadap laba sebelum pajak (Minh Ha et al., 2021).	hanya membayar sedikit pajak dibandingkan laba sebelum pajak. • Sebaliknya, jika nilainya mendekati 0, maka tingkat penghindaran pajak rendah, yang menunjukkan perusahaan membayar pajak hampir penuh sesuai laba sebelum pajak.
4	Komisaris Independen (Z)	Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen, pemegang saham pengendali, atau hubungan bisnis lainnya yang dapat memengaruhi independensinya dalam pengawasan (Idris et al., 2020).	Proporsi Komisaris Independen $= \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Total Anggota Dewan}}$
5	Leverage (K1)	Leverage adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan utang untuk membiayai aktivitas operasional dan investasi guna meningkatkan potensi keuntungan. Leverage diukur menggunakan rasio <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER), yaitu perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas Perusahaan (Khairunnisa & Angyani, 2023).	$\text{DER} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$
6	Ukuran Perusahaan (K2)	Ukuran perusahaan mencerminkan besar kecilnya suatu entitas usaha yang dapat	Size = LN (Total Aset)

		memengaruhi kemampuan operasional, struktur modal, dan akses terhadap sumber daya. Ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural dari total aset pada akhir tahun buku (Hardiningsih et al., 2024).	
--	--	--	--

### 3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan *software Warp PLS* versi 8, sebuah perangkat lunak statistik yang dirancang untuk pemodelan persamaan struktural (*Structural Equation Modeling/SEM*) berbasis varians. *Warp PLS* dipilih karena kemampuannya untuk menganalisis hubungan kompleks antar variabel dengan mempertimbangkan distribusi data yang mungkin tidak normal serta menangani model yang melibatkan indikator laten dan variabel manifest. Pengukuran dalam WarpPLS yaitu model pengukuran yakni model pengukuran model struktural yang digunakan untuk menguji kausalitas atau pengujian hipotesis untuk menguji dengan model prediksi (*inner model*) (Sholihin & Ratmono, 2021).

#### 3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif menurut Ghozali, (2018) adalah langkah awal yang esensial dalam analisis data penelitian. Uji ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkas, dan menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami, sehingga peneliti dapat memahami karakteristik dasar dari data

yang telah dikumpulkan. Statistik deskriptif membantu dalam memahami pola umum dan penyebaran data sebelum melangkah ke analisis yang lebih kompleks, seperti uji statistik inferensial. Menurut Ghozali, (2018), statistik deskriptif meliputi beberapa uji minimal, maksimal, median, rata-rata dan standar deviasi.

### 3.6.2 Uji Model Struktural (*Inner Model*)

Analisis *inner model* untuk penelitian yang dilakukan ini bertujuan guna mengamati korelasi antara nilai signifikansi terhadap konstruk. Mengevaluasi hasil pengujian model struktural terdapat beberapa langkah yang dilakukan, diantaranya (Hair Jr et al., 2017).

#### 1. Uji Koefisien Determinasi *R-Square* ( $R^2$ )

Menurut Sholihin & Ratmono, (2021), uji koefisien determinasi  $R^2$  (*R-Square*) adalah alat penting dalam evaluasi model struktur (*inner model*) dalam analisis SEM (*Structural Equation Modeling*).  $R^2$  mengukur proporsi variansi dalam variabel dependen (endogen) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (eksogen) dalam model. Fungsi utama dari  $R^2$  adalah untuk menilai sejauh mana model dapat menjelaskan variabilitas data, yang berarti semakin tinggi nilai  $R^2$ , semakin baik model dalam menjelaskan variasi variabel endogen. Interpretasi nilai  $R^2$  dapat dibagi menjadi tiga kategori: nilai  $R^2$  sebesar 0,67 atau lebih menunjukkan kekuatan prediksi yang baik; nilai antara 0,33 sampai 0,66 menunjukkan kekuatan prediksi yang sedang; dan nilai kurang dari 0,33 menunjukkan kekuatan prediksi yang lemah.

## 2. Uji Koefisien Determinasi $Q^2$ ( $Q^2$ )

Menurut Sholihin & Ratmono, (2021), uji koefisien determinasi  $Q^2$  ( $Q^2$ ) adalah indikator penting dalam analisis SEM yang mengukur relevansi prediktif atau kekuatan prediksi model di luar sampel yang digunakan untuk estimasi. Nilai *Stone-Geisser*  $Q^2$  memberikan gambaran tentang seberapa baik model dapat memprediksi variabilitas variabel endogen yang tidak teramati dalam data sampel. Dengan mengukur  $Q^2$ , peneliti dapat menilai kemampuan model dalam memprediksi nilai variabel endogen pada data yang baru atau di luar sampel yang digunakan. Interpretasi nilai  $Q^2$  menunjukkan bahwa jika nilai  $Q^2$  lebih besar dari 0, model memiliki kemampuan prediksi yang lebih baik dibandingkan model tanpa prediktor. Sebaliknya, nilai  $Q^2$  yang sama dengan atau kurang dari 0 menunjukkan bahwa model tidak memiliki kemampuan prediksi yang lebih baik atau bahkan lebih buruk daripada model yang tidak menggunakan prediktor.

## 3. Effect Size ( $F$ -Square)

Menurut Sarstedt et al., (2020) uji *effect size* ( $f^2$ ) dilakukan untuk menguji besaran dampak antar variabel independen terhadap variabel dependen. Saat pengujian, tidak hanya memperhatikan ada tidaknya hubungan yang signifikan antar variabel, tapi juga mempertimbangkan besarnya pengaruh antar variabel dengan *effect size*. Kock dan Hair dalam penelitian mereka yang dikutip oleh Sholihin & Ratmono, (2021) menyatakan bahwa nilai  $F$ -square dikelompokkan menjadi tiga yaitu

0,02 kecil, 0,15 sedang dan 0,35 besar. Nilai  $< 0,02$  dapat diabaikan atau dianggap tidak berpengaruh (Sarstedt et al., 2020).

### 3.6.3 Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis menggunakan *WarpPLS*, analisis dilakukan dengan memeriksa tabel *Path Coefficients* yang dihasilkan melalui metode bootstrapping. *Bootstrapping* adalah teknik resampling yang digunakan untuk menghitung nilai *T-values* dan *P-Values*, yang esensial dalam menguji signifikansi koefisien jalur dalam model. Saat melakukan pengujian dengan Metode *bootstapping*, akan muncul hasil dari original sample yang merupakan koefisien penelitian akan menunjukkan arah dari hipotesis yang diuji apakah positif atau negatif. Hasil pengujian hipotesis pada metode *bootstapping* menunjukkan hasil nilai *P-Values* harus lebih kecil dari 0,05 yang akan berdampak pada hubungan antara variabel dianggap signifikan. *P-value*  $< 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ), sehingga apabila hasil penelitian menunjukkan *P-Value*  $< 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ) maka hipotesis alternatif diterima atau signifikan (Sholihin & Ratmono, 2020).

T-statistik mengukur seberapa besar koefisien jalur atau parameter model berbeda dari nol relatif terhadap kesalahan standarnya. Ini adalah cara untuk menentukan apakah koefisien yang diestimasi signifikan secara statistik dalam model. Studi ini memanfaatkan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( $\alpha=5\%$ ) yang setara dengan nilai 1,96 pada tabel distribusi t. Ghazali, (2013) menjelaskan beberapa kriteria yang digunakan dalam mengetahui keberadaan dampak secara parsial dalam pengujian diantaranya:

- a. Nilai signifikansi  $t > 0,05$ , menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak/tidak didukung.
- b. Nilai signifikansi  $t < 0,05$ , menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen, maka  $H_0$  ditolak/tidak didukung dan  $H_1$  diterima.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024. Sektor keuangan yang dimaksud meliputi perbankan, perusahaan pembiayaan (*leasing/multifinance*), asuransi, sekuritas, serta lembaga jasa keuangan lainnya. Pemilihan sektor ini didasarkan pada karakteristik industri yang memiliki tingkat regulasi tinggi dan tata kelola perusahaan yang kompleks, sehingga relevan untuk menguji pengaruh koneksi politik, penghindaran pajak, dan komisaris independen terhadap nilai perusahaan. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut tabel kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 4.1 Kriteria Penentuan Sampel Penelitian**

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan sektor keuangan meliputi perbankan, leasing, asuransi, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang terdaftar dalam sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024.	106
2.	Perusahaan sektor keuangan mencakup sub-sektor perbankan, perusahaan pembiayaan ( <i>leasing/multifinance</i> ), asuransi, sekuritas, dan perusahaan investasi lainnya yang tidak secara konsisten menerbitkan laporan keuangan tahunan lengkap selama periode penelitian.	(33)
3.	Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap terkait variabel penelitian, yaitu koneksi politik, penghindaran pajak, komisaris independen, dan nilai perusahaan.	2
<b>Jumlah Sampel Akhir Perusahaan</b>		<b>71</b>
<b>Jumlah observasi 71 x 4 Tahun (Jumlah Perusahaan x Jumlah tahun Pengamatan)</b>		<b>284</b>

**Sumber:** Data diolah Peneliti, (2025)

Berdasarkan tabel 4.1 jumlah awal perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2024 adalah sebanyak 106 perusahaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 33 perusahaan dikeluarkan dari sampel penelitian karena tidak secara konsisten menerbitkan laporan keuangan tahunan yang lengkap selama periode pengamatan. Selain itu, terdapat 2 perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sampel karena tidak memiliki data lengkap terkait variabel penelitian, yaitu koneksi politik, penghindaran pajak, komisaris independen, dan nilai perusahaan. Dengan demikian, jumlah sampel akhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 71 perusahaan. Dengan periode pengamatan selama empat tahun, total jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 284 observasi.

## 4.2 Hasil Analisis Data

### 4.2.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian yang meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Hasil uji statistik deskriptif untuk seluruh variabel penelitian disajikan pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2 Statistik Deskriptif**

	<b>N</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
Nilai Perusahaan (Y)	284	0.01	9.61	1.63	1.82
Koneksi Politik (X1)	284	0.00	1.38	0.15	0.34
<i>Tax Avoidance</i> (X2)	284	-8.41	1.95	0.13	0.60
Komisaris Independen (X3)	284	0.16	0.80	0.51	0.12
Leverage (X4)	284	0.00	9.60	2.35	2.15
Ukuran Perusahaan (X5)	284	12.07	21.41	16.32	2.24

**Sumber:** Data diolah *WarpPLS* 8.0, (2025)

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa variabel nilai perusahaan (Y) memiliki jumlah observasi sebanyak 284 dengan nilai minimum sebesar 0,01 dan nilai maksimum sebesar 9,61. Nilai rata-rata (*mean*) variabel nilai perusahaan adalah sebesar 1,63 dengan standar deviasi sebesar 1,82. Hal ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan pada sektor keuangan selama periode penelitian memiliki tingkat variasi data yang cukup tinggi, yang tercermin dari nilai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan nilai rata-ratanya.

Variabel koneksi politik (X1) memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 1,38 dengan nilai rata-rata sebesar 0,15 serta standar deviasi sebesar 0,34. Nilai rata-rata yang relatif kecil mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan sektor keuangan dalam sampel penelitian memiliki tingkat koneksi politik yang rendah, meskipun terdapat variasi antar perusahaan.

Selanjutnya, variabel *tax avoidance* (X2) menunjukkan nilai minimum sebesar -8,41 dan nilai maksimum sebesar 1,95. Variabel ini memiliki nilai rata-rata sebesar 0,13 dengan standar deviasi sebesar 0,60. Nilai minimum yang negatif mengindikasikan adanya perbedaan praktik penghindaran pajak antar perusahaan, sementara nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata menunjukkan adanya variasi data yang cukup signifikan.

Variabel komisaris independen (X3) memiliki nilai minimum sebesar 0,16 dan nilai maksimum sebesar 0,80. Nilai rata-rata variabel ini adalah sebesar 0,51 dengan standar deviasi sebesar 0,12. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum proporsi komisaris independen pada perusahaan sektor keuangan telah memenuhi ketentuan regulasi, dengan tingkat variasi data yang relatif rendah.

Variabel leverage (X4) memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 9,608. Nilai rata-rata leverage sebesar 2,35 dengan standar deviasi sebesar 2,15. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penggunaan utang pada perusahaan sektor keuangan cukup bervariasi, dengan sebagian perusahaan memiliki tingkat leverage yang relatif tinggi.

Terakhir, variabel ukuran perusahaan (X5) memiliki nilai minimum sebesar 12,07 dan nilai maksimum sebesar 21,41. Nilai rata-rata ukuran perusahaan sebesar 16,32 dengan standar deviasi sebesar 2,24. Hasil ini mengindikasikan adanya perbedaan skala perusahaan yang cukup signifikan di antara perusahaan sektor keuangan yang menjadi sampel penelitian.

#### **4.2.2 Uji Model Struktural (*Inner Model*)**

Uji model struktural (*inner model*) bertujuan untuk mengevaluasi hubungan kausal antar variabel laten dalam model penelitian serta menguji kemampuan model dalam menjelaskan dan memprediksi variabel endogen. Pengujian ini dilakukan dengan menganalisis nilai koefisien determinasi (*R-Square*), *predictive relevance* (*Q-Square*), *effect size* (*F-Square*), serta koefisien jalur dan tingkat signifikansinya (Ghozali & Latan, 2015; Hair Jr et al., 2017).

##### **1. Uji Koefisien Determinasi *R-Square* ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi atau *R-Square* ( $R^2$ ) digunakan untuk menilai kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel endogen. Menurut Hair et al. (2019), nilai *R-Square* dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kriteria, yaitu 0,25 menunjukkan model lemah, 0,50 menunjukkan model moderat, dan 0,75

menunjukkan model substansial atau kuat. Berikut disajikan hasil pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ) dalam penelitian ini.

**Tabel 4. 3 Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

	Nilai Perusahaan
<i>R-squared</i>	0.95
<i>Adj. R-squared</i>	0.94

**Sumber:** Data diolah WarpPLS 8.0, (2025)

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi (*R-Square*), diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0,95 pada variabel nilai perusahaan. Mengacu pada kriteria yang dikemukakan oleh Hair et al., (2019), nilai *R-Square* sebesar 0,95 termasuk dalam kategori model substansial atau kuat, karena melebihi ambang batas 0,75. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan variasi nilai perusahaan. Secara empiris, hasil tersebut mengindikasikan bahwa 95,0% variasi nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam model penelitian, yaitu koneksi politik, *tax avoidance*, komisaris independen, leverage, dan ukuran perusahaan, sedangkan sisanya sebesar 5,0% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

## 2. Uji Koefisien Determinasi *Q-Square* ( $Q^2$ )

Uji koefisien determinasi *Q-Square* ( $Q^2$ ) digunakan untuk menilai relevansi prediktif model struktural, yaitu sejauh mana model penelitian memiliki kemampuan dalam memprediksi variabel endogen. Nilai *Q-Square* yang lebih besar dari nol menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang baik (Sholihin & Ratmono, 2021).

**Tabel 4.4 Hasil Uji Q-Squared**

	<b>Nilai Perusahaan</b>
<i>Q-squared</i>	0.95

**Sumber:** Data diolah *WarpPLS* 8.0, (2025)

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 4.4, diperoleh nilai *Q-Square* ( $Q^2$ ) sebesar 0,95. Secara matematis, nilai tersebut lebih besar dari nol ( $0,95 > 0$ ), sehingga memenuhi kriteria yang dikemukakan oleh Sholihin & Ratmono, (2021) yang menyatakan bahwa model memiliki relevansi prediktif apabila nilai  $Q^2$  lebih besar dari nol. Dengan demikian, model penelitian ini dinilai memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik terhadap variabel nilai perusahaan, sehingga model struktural yang dibangun dinilai layak dan memiliki kemampuan prediksi yang baik untuk digunakan dalam analisis lanjutan.

### 3. Uji Effect Size (*F-Square*)

Uji *effect size* ( $F\text{-Square}/F^2$ ) digunakan untuk menilai besarnya kontribusi masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam model struktural. Menurut Hair et al., (2019), nilai *F-Square* sebesar 0,02 dikategorikan kecil (lemah), 0,15 dikategorikan sedang (medium), dan 0,35 dikategorikan besar (kuat). Berikut tabel hasil uji *effect size* ( $F\text{-Square}/F^2$ ).

**Tabel 4.5 Hasil Effect Size (*F-Square*)**

<b>Variabel</b>	<b>Effect Size (<math>F^2</math>)</b>	<b>Kategori</b>
Koneksi politik → Nilai perusahaan	0.19	Medium
<i>Tax Avoidance</i> → Nilai perusahaan	0.07	Lemah
Koneksi politik*Komisaris independent → Nilai perusahaan	0.54	Besar
<i>Tax Avoidance</i> *Komisaris independent → Nilai perusahaan	0.06	Lemah
Leverage → Nilai Perusahaan	0.14	Medium
Ukuran perusahaan → Nilai perusahaan	0.33	Medium

**Sumber:** Data diolah *WarpPLS* 8.0, (2025)

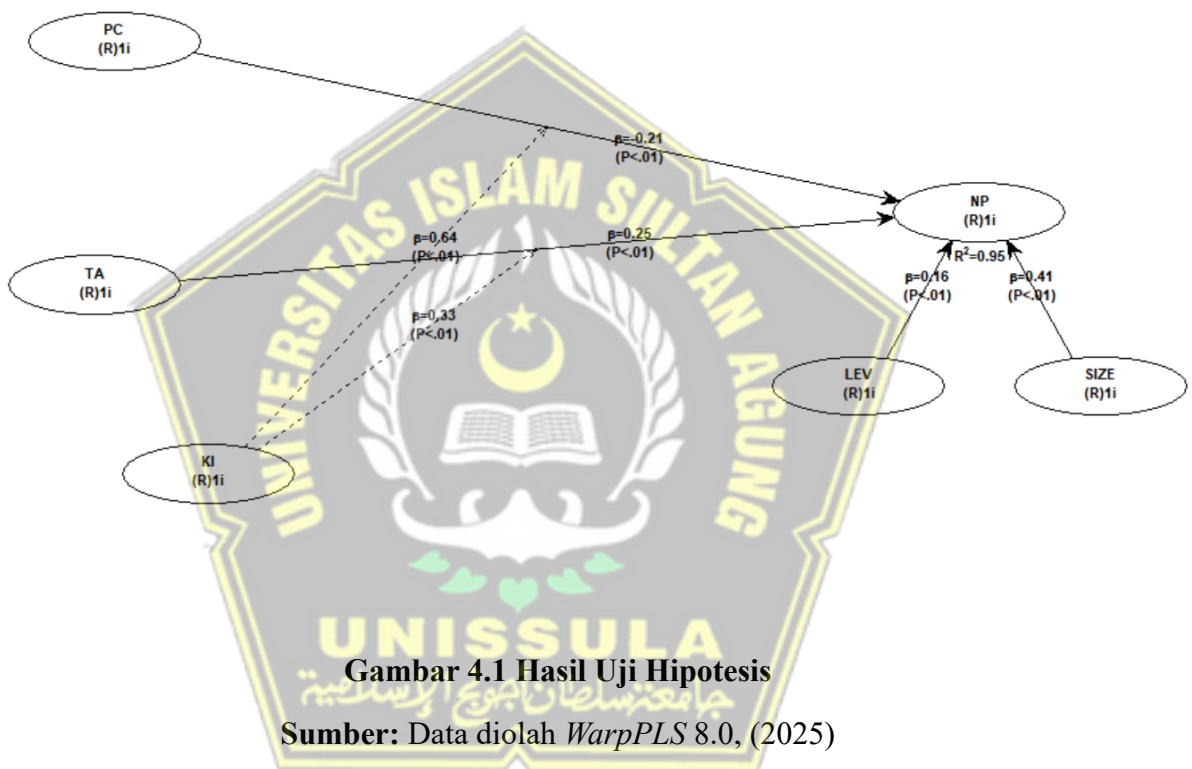
Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 4.5, variabel koneksi politik terhadap nilai perusahaan memiliki nilai *F-Square* sebesar 0,19 yang termasuk dalam kategori medium, yang menunjukkan bahwa koneksi politik memberikan kontribusi pengaruh yang cukup berarti terhadap nilai perusahaan. Variabel *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan memiliki nilai *F-Square* sebesar 0,07 yang termasuk dalam kategori lemah, sehingga pengaruhnya terhadap nilai perusahaan relatif kecil.

Selanjutnya, interaksi koneksi politik dengan komisaris independen terhadap nilai perusahaan menunjukkan nilai *F-Square* sebesar 0,54 yang berada dalam kategori besar, yang mengindikasikan bahwa komisaris independen mampu memperkuat pengaruh koneksi politik terhadap nilai perusahaan secara signifikan. Sementara itu, interaksi *tax avoidance* dengan komisaris independen terhadap nilai perusahaan memiliki nilai *F-Square* sebesar 0,06 yang termasuk dalam kategori lemah, yang menunjukkan bahwa peran komisaris independen dalam memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan relatif kecil.

Variabel *leverage* terhadap nilai perusahaan memiliki nilai *F-Square* sebesar 0,14 yang termasuk dalam kategori medium, sedangkan variabel ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan memiliki nilai *F-Square* sebesar 0,33 yang juga berada dalam kategori medium. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua variabel kontrol tersebut memiliki kontribusi pengaruh yang cukup berarti terhadap nilai perusahaan.

### 4.2.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Sholihin & Ratmono, 2021). Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan aplikasi *WarpPLS 7.0*, pengujian *inner model* atau model struktural menghasilkan gambaran model akhir penelitian sebagai berikut:



Hubungan antar konstruk dianalisis dengan memperhatikan hasil estimasi koefisien jalur (*path coefficient*) serta tingkat signifikansi (*p-value*), yang selanjutnya dibandingkan dengan hipotesis penelitian yang telah dirumuskan. Suatu hubungan dinyatakan signifikan apabila nilai *p-value*  $\leq 0,05$ . Selain itu, arah pengaruh antar variabel ditentukan berdasarkan tanda koefisien jalur, di mana koefisien bernilai positif menunjukkan hubungan searah, sedangkan koefisien

bernilai negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah. Berikut hasil pengujian hipotesis secara keseluruhan disajikan pada Tabel 4.6.

**Tabel 4.6 Hasil Uji Hipotesis**

Variabel	<i>Path Coefficients</i>	<i>P-Value</i>	Keterangan
Koneksi politik → Nilai perusahaan	-0.21	<0.001	Negatif signifikan
<i>Tax Avoidance</i> → Nilai perusahaan	0.25	<0.001	Positif signifikan
Koneksi politik*Komisaris independent → Nilai perusahaan	0.63	<0.001	Positif signifikan
<i>Tax Avoidance</i> *Komisaris independent → Nilai perusahaan	0.33	<0.001	Positif signifikan
Leverage → Nilai Perusahaan	0.16	<0.001	Positif signifikan
Ukuran perusahaan → Nilai perusahaan	0.41	<0.001	Positif signifikan

**Sumber:** Data diolah *WarpPLS* 8.0, (2025)

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan aplikasi *WarpPLS* 7.0, diperoleh hasil pengujian hipotesis sebagaimana disajikan pada Tabel 4.6, yang selanjutnya dianalisis sebagai berikut:

### 1. Pengaruh Koneksi Politik terhadap Nilai Perusahaan

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan nilai *path coefficient* sebesar -0,212 yang menunjukkan arah pengaruh negatif serta nilai *p-value* < 0,001, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga pengaruhnya dinyatakan signifikan. Dengan demikian, koneksi politik terbukti memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap nilai perusahaan, sehingga hipotesis pertama (H1) ditolak.

### 2. Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Nilai Perusahaan

Hasil pengujian pada hipotesis kedua menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *path coefficient* sebesar 0,250 yang mengindikasikan arah pengaruh positif dengan nilai *p-value*  $< 0,001$ , yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, *tax avoidance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima.

### **3. Peran Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh Koneksi Politik terhadap Nilai Perusahaan**

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa komisaris independen mampu memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap nilai perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *path coefficient* sebesar 0,636 dengan arah positif serta nilai *p-value*  $< 0,001$ , yang berada di bawah 0,05, sehingga pengaruh moderasi dinyatakan signifikan. Dengan demikian, komisaris independen memperkuat hubungan antara koneksi politik dan nilai perusahaan, sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima.

### **4. Peran Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan**

Hasil pengujian pada hipotesis keempat menunjukkan bahwa komisaris independen memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan secara positif dan signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai *path coefficient* sebesar 0,332 serta nilai *p-value*  $< 0,001$ , yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, keberadaan komisaris independen memperkuat pengaruh *tax*

*avoidance* terhadap nilai perusahaan, sehingga hipotesis keempat (H4) diterima.

## 5. Pengaruh Leverage terhadap Nilai Perusahaan

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *path coefficient* sebesar 0,160 dengan nilai *p-value*  $< 0,001$ , yang berada di bawah 0,05, sehingga pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan dinyatakan positif dan signifikan.

## 6. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan

Hasil pengujian pada hipotesis keenam menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan nilai *path coefficient* sebesar 0,413 serta nilai *p-value*  $< 0,001$ , yang lebih kecil dari 0,05, sehingga pengaruhnya dinyatakan signifikan. Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi nilai perusahaan,

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Pengaruh Koneksi Politik terhadap Nilai Perusahaan

Koneksi politik terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat koneksi politik, semakin rendah nilai perusahaan di pasar. Temuan ini mengindikasikan bahwa investor memersepsikan koneksi politik sebagai faktor risiko karena berpotensi menurunkan independensi pengelolaan perusahaan serta meningkatkan ketidakpastian pengambilan keputusan,

khususnya pada sektor keuangan yang sangat bergantung pada kepercayaan publik.

Hasil uji statistik deskriptif, variabel koneksi politik memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,153 dengan standar deviasi 0,347, yang menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil perusahaan yang memiliki koneksi politik kuat. Kondisi ini menyebabkan pasar merespons negatif perusahaan yang memiliki koneksi politik karena dipersepsikan menyimpang dari praktik tata kelola yang profesional dan independen.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui *Agency Theory*, yang menekankan adanya potensi konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Koneksi politik yang dimiliki manajemen berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, seperti memperoleh perlindungan regulasi, akses kebijakan, atau keuntungan non-ekonomis lainnya, yang tidak selalu sejalan dengan tujuan pemegang saham dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Kondisi ini dapat meningkatkan biaya keagenan, menurunkan efektivitas pengawasan, serta melemahkan mekanisme tata kelola perusahaan. Akibatnya, investor menilai koneksi politik sebagai sumber konflik kepentingan dan risiko, sehingga merespons secara negatif dan menurunkan nilai perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supatmi et al. (2021) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Efendi et al., (2022) dan Herman & Abbas, (2024) menunjukkan bahwa koneksi politik dapat menurunkan nilai

perusahaan. Sedangkan penelitian Namun demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu Pratama & Setiawan, (2019); Momon et al., (2021); Cahyono & Ardianto, (2024); Hardiningsih et al., (2024) menemukan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.

#### 4.3.2 Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Nilai Perusahaan

Hasil uji menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya, semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan, maka nilai perusahaan cenderung meningkat. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik penghindaran pajak dipersepsikan pasar sebagai strategi yang mampu meningkatkan efisiensi perusahaan melalui penghematan beban pajak, sehingga berdampak pada peningkatan laba dan nilai perusahaan.

Hasil uji statistik deskriptif, variabel *tax avoidance* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,13436 dengan standar deviasi sebesar 0,60791, serta nilai minimum -8,418 dan nilai maksimum 1,950. Nilai rata-rata yang relatif kecil menunjukkan bahwa secara umum perusahaan sektor keuangan dalam sampel penelitian tidak melakukan praktik *tax avoidance* secara agresif. Sebagian perusahaan yang mampu melakukan *tax avoidance* secara efektif dan terkendali. Teori keagenan (*agency theory*), di mana manajemen sebagai agen berupaya memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan menekan biaya, termasuk beban pajak. Selama praktik *tax avoidance* tidak

melanggar ketentuan hukum, tindakan tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan dan selaras dengan kepentingan pemegang saham.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Amini et al. (2024); Shidqi et al., (2024), Cahyono & Ardianto, (2024); Mangoting et al., (2020) mengungkapkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya semakin tinggi nilai penghindaran pajak, perusahaan menahan lebih banyak uang tunai yang dapat digunakan untuk dividen atau investasi lainnya sehingga semakin tinggi pula nilai perusahaan. Namun demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian Khan et al. (2020); Shubita, (2024); Herman & Abbas, (2024) menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.

#### **4.3.3 Peran Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh Koneksi Politik terhadap Nilai Perusahaan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen memperkuat pengaruh koneksi politik terhadap nilai perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen tidak menghilangkan koneksi politik yang dimiliki perusahaan, tetapi justru berperan dalam mengelola dan mengarahkan koneksi politik tersebut agar memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Dengan pengawasan yang efektif, koneksi politik dapat dimanfaatkan secara lebih profesional dan tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan terhadap nilai perusahaan.

Teori keagenan (*agency theory*), komisaris independen berperan penting dalam mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, terutama ketika perusahaan memiliki koneksi politik. Tanpa pengawasan yang memadai, koneksi politik berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Namun, dengan adanya komisaris independen, risiko tersebut dapat ditekan sehingga koneksi politik tidak merugikan nilai perusahaan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Setiawan et al. (2019); Khan et al. (2020); Mangoting et al., (2020); Idris et al., (2020) menyatakan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan, khususnya komisaris independen, mampu memperkuat pengaruh positif koneksi politik terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Namun berbeda dengan beberapa penelitian Efendi et al., (2022); Kholid & Rahmawati, (2023); Oyetunji et al., (2023); Sadjarto et al., (2024) menyatakan bahwa komisaris independen mampu melemahkan dampak negatif koneksi politik terhadap nilai perusahaan.

#### **4.3.4 Peran Komisaris Independen dalam Memoderasi Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Nilai Perusahaan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen mampu memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan secara positif dan signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen berperan dalam memperkuat pengaruh *tax avoidance* terhadap peningkatan nilai perusahaan. Dengan kata lain, praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dapat memberikan dampak yang lebih positif terhadap

nilai perusahaan apabila berada dalam pengawasan komisaris independen yang efektif.

Hasil uji statistik deskriptif, variabel komisaris independen memiliki nilai rata-rata sebesar 0,518 dengan standar deviasi 0,129, yang menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan sampel telah memenuhi proporsi komisaris independen pada tingkat yang relatif memadai dan cenderung seragam antar perusahaan. Kondisi ini mencerminkan adanya mekanisme pengawasan yang cukup kuat dalam struktur tata kelola perusahaan, sehingga kebijakan manajemen, termasuk kebijakan perpajakan, tidak mudah dijalankan secara oportunistik. Sementara itu, variabel *tax avoidance* memiliki nilai rata-rata 0,134 dengan standar deviasi yang relatif tinggi sebesar 0,608, yang menunjukkan adanya variasi praktik *tax avoidance* yang cukup besar antar perusahaan.

Perbedaan tingkat *tax avoidance* tersebut menegaskan bahwa peran komisaris independen menjadi faktor penting dalam menentukan bagaimana praktik *tax avoidance* dipersepsikan oleh investor. *Tax avoidance* yang berada dalam pengawasan komisaris independen cenderung dipandang sebagai strategi efisiensi pajak yang wajar, terukur, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga mampu meningkatkan laba setelah pajak dan pada akhirnya berdampak positif terhadap nilai perusahaan. Dari perspektif teori keagenan (*agency theory*) Tanpa pengawasan yang kuat, koneksi politik berpotensi dimanfaatkan secara oportunistik. Namun, dengan proporsi

komisaris independen yang memadai, risiko tersebut dapat ditekan sehingga koneksi politik tidak merugikan nilai perusahaan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Alhady et al., (2021); Khan et al. (2020); Shidqi et al., (2024) menyatakan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan, khususnya komisaris independen, mampu memperkuat pengaruh positif koneksi politik terhadap nilai perusahaan. Namun demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan beberapa studi Budiman & Fitriana, (2021); Amini et al., (2024); yang menyatakan bahwa komisaris independen mampu melemahkan dampak negatif koneksi politik terhadap nilai perusahaan.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan mengenai pengaruh koneksi politik dan *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan, serta peran komisaris independen dalam memoderasi hubungan tersebut pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2024. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan leverage dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi nilai perusahaan. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh beberapa temuan penting terkait hubungan antar variabel dalam penelitian ini.

1. Koneksi politik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan adanya pengaruh positif koneksi politik terhadap nilai perusahaan ditolak.
2. Selanjutnya, *tax avoidance* terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sehingga hipotesis kedua diterima.
3. Ketiga menunjukkan bahwa komisaris independen mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh koneksi politik terhadap nilai perusahaan, sehingga hipotesis ketiga diterima.
4. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa komisaris independen juga mampu memoderasi dan memperkuat

pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan, sehingga hipotesis keempat diterima.

5. Selain itu, leverage dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

## 5.2 Implikasi

Penelitian ini memiliki implikasi penting baik secara teoretis maupun praktis bagi akademisi, praktisi, regulator, dan pemangku kepentingan di sektor keuangan.

### 5.2.1 Implikasi Teoretis

Hasil penelitian ini memperkuat teori keagenan (*agency theory*) dan konsep tata kelola perusahaan (*good corporate governance*). Temuan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan menegaskan bahwa keterlibatan politik dapat meningkatkan risiko konflik kepentingan dan menurunkan persepsi pasar terhadap kualitas tata kelola perusahaan. Hal ini memperkaya literatur yang sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait peran koneksi politik dalam meningkatkan nilai perusahaan.

Selain itu, temuan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan mendukung pandangan bahwa praktik efisiensi pajak yang legal dan terkontrol dapat meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Peran komisaris independen sebagai variabel moderasi juga memperkuat literatur yang menyatakan bahwa mekanisme tata kelola yang kuat mampu mengarahkan kebijakan perusahaan agar tetap memberikan manfaat ekonomi tanpa meningkatkan risiko tata kelola dan reputasi.

## 5.2.2 Implikasi Praktis

### a. Bagi Manajemen Perusahaan

Manajemen perlu lebih berhati-hati dalam memanfaatkan koneksi politik karena hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik justru dapat menurunkan nilai perusahaan jika tidak dikelola dengan baik. Perusahaan disarankan untuk lebih menekankan profesionalisme, transparansi, dan independensi dalam pengambilan keputusan strategis.

Dalam hal *tax avoidance*, manajemen dapat memanfaatkan strategi efisiensi pajak secara legal dan terukur sebagai upaya meningkatkan laba dan nilai perusahaan. Namun, praktik tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum dan etika bisnis agar tidak menimbulkan risiko reputasi dan sanksi hukum.

### b. Bagi Dewan Komisaris, khususnya Komisaris Independen

Hasil penelitian menegaskan pentingnya peran komisaris independen dalam memperkuat pengaruh positif kebijakan perusahaan, baik terkait koneksi politik maupun *tax avoidance*. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan proporsi dan kualitas komisaris independen yang memadai, serta memperkuat fungsi pengawasan, audit, dan kepatuhan.

### c. Bagi Investor

Investor dapat menggunakan informasi mengenai tingkat koneksi politik, praktik *tax avoidance*, serta struktur dewan komisaris sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

Perusahaan dengan tata kelola yang kuat dan pengawasan yang efektif cenderung memiliki risiko yang lebih rendah dan nilai perusahaan yang lebih stabil.

#### d. Bagi Regulator dan Pembuat Kebijakan

Temuan ini memberikan dasar empiris bagi regulator untuk terus memperkuat regulasi terkait tata kelola perusahaan, khususnya mengenai independensi dewan komisaris dan transparansi hubungan politik perusahaan. Regulator juga perlu memastikan bahwa praktik *tax avoidance* tetap berada dalam batas kepatuhan hukum untuk menjaga integritas sistem keuangan dan penerimaan negara.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Bagian ini peneliti menyajikan keterbatasan penelitian yang dialami selama proses penelitian. Keterbatasan penelitian ini tentunya tidak sama dengan peneliti lain atau keterbatasan yang bukan disengaja, melainkan merupakan batasan yang secara realistis dihadapi dalam pelaksanaan penelitian ini.

1. Pertama, penelitian ini menggunakan variabel koneksi politik dan *tax avoidance* sebagai variabel utama, serta komisaris independen sebagai variabel moderasi, dengan leverage dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Masih terdapat kemungkinan bahwa nilai perusahaan dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti profitabilitas, risiko perusahaan,

kualitas audit, kepemilikan institusional dan manajerial, *corporate social responsibility* (CSR), reputasi perusahaan.

2. Kedua, pengukuran variabel koneksi politik dan tax avoidance didasarkan pada data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan, sehingga hasil pengukuran sangat bergantung pada kelengkapan dan kualitas informasi yang diungkapkan oleh perusahaan.
3. Ketiga, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah WarpPLS, yang meskipun mampu mengolah model kompleks dan hubungan non-linear, tetap memiliki keterbatasan dalam menjelaskan hubungan kausal secara menyeluruh dibandingkan metode penelitian eksperimental atau pendekatan kualitatif.

#### **5.4 Agenda Penelitian Mendatang**

Agenda penelitian mendatang ini mencakup topik maupun metodologi yang digunakan, sehingga dapat diteliti oleh mahasiswa yang lain sebagai pengembangan dari penelitian ini.

1. Pertama, penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian ke sektor industri lain di luar sektor keuangan, seperti sektor manufaktur, pertambangan, energi, atau sektor jasa, serta memperpanjang periode pengamatan agar hasil penelitian lebih general dan komprehensif.
2. Kedua, penelitian mendatang dapat menambahkan variabel lain yang relevan,, serta kualitas tata kelola perusahaan sebagai variabel mediasi atau moderasi dalam menjelaskan nilai perusahaan.

3. Ketiga, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan dan memperkaya pengukuran variabel koneksi politik, tidak hanya berdasarkan keberadaan pejabat atau mantan pejabat dalam struktur manajemen atau dewan komisaris, tetapi juga dengan mempertimbangkan intensitas hubungan politik, posisi jabatan politik, durasi keterlibatan, afiliasi partai, serta jaringan relasi politik perusahaan, sehingga pengukuran menjadi lebih komprehensif dan akurat.
4. Keempat, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda, seperti regresi data panel, metode campuran (*mixed methods*), atau pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik koneksi politik, kebijakan perpajakan, serta peran dewan komisaris dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan.
5. Kelima, penelitian mendatang dapat mengkaji pengaruh koneksi politik dan *tax avoidance* dalam kondisi ekonomi yang berbeda, seperti masa krisis ekonomi, periode pemulihan, atau perubahan kebijakan perpajakan dan regulasi, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dan dinamis terhadap nilai Perusahaan.

## Daftar Pustaka

- Aditya, R. A., Ariani, D., & Tantra, A. R. (2023). The Effect of Corporate Social Responsibility (CSR) and Company Size on Company Value with Profitability as A Moderation Variable in Manufacturing Companies. *The Virtual International ...*, 5(2), 794–804.
- Al-Qudah, A. A., & Houcine, A. (2023). Firms' characteristics, corporate governance, and the adoption of sustainability reporting: evidence from Gulf Cooperation Council countries. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-02-2023-0066>
- Alhady, I., Arieftiara, D., & Lastiningsih, N. (2021). Does board of commissioners independence still relevant in tax avoidance monitoring? *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 10(5), 148–156. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1263>
- Amini, A., Kholis, A., & Ikhsan, A. (2024). The Effect of Tax Avoidance on Company Value With Managerial Ownership as a Moderation Variable in Manufacturing Companies. *Dinasti International Journal of Economics, Finance and Accounting (DIJEFA)*, 5(2), 794–804. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/dijefa.v5i2.2725>
- Azam, M., & Wang, M. (2020). The effects of tax avoidance on corporate value. *Research Journal of Finance and Accounting*, 11(4), 118–125. <https://doi.org/10.7176/rjfa/11-4-13>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of Financial Management, 15th Edition*. Cengage Learning : Boston.
- Budiman, S. E. P., & Fitriana, V. E. (2021). The Moderating Role of Corporate Governance on the Relationship between Tax Avoidance and Firm Value. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 4(1), 65–71. <https://doi.org/10.26905/afr.v4i1.5973>
- Cadbury, A. (2000). The Corporate Governance Agenda. *Corporate Governance: An International Review*, 8(1), 7–15. <https://doi.org/10.1111/1467-8683.00175>
- Cahyono, S., & Ardianto, A. (2024). Intellectual Capital, Political Connection, and Firm Performance: Exploring from Indonesia. *Risks*, 12(7). <https://doi.org/10.3390/risks12070105>
- Dyrengr, S. D., Hanlon, M., Maydew, E. L., & Thornock, J. R. (2017). Changes in corporate effective tax rates over the past 25 years. *Journal of Financial Economics*, 124(3), 441.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2017.04.001>

- Efendi, Z., Susilawati, S., & Suryaningsih, M. (2022). Firm Value and Firm Performance with Political Connections. *Iconic Research and Engineering*, 5(8), 7–16. <https://www.irejournals.com/formatedpaper/1703178.pdf>
- Eissa, A. M., & Eliwa, Y. (2021). The effect of political connections on firm performance: evidence from Egypt. *Asian Review of Accounting*, 29(3), 362–382. <https://doi.org/10.1108/ARA-05-2020-0064>
- Fajriah, A. L., Idris, A., & Nadhiroh, U. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Pertumbuhan Perusahaan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.38043/jimb.v7i1.3218>
- Ghozali, I. (2018). *Multivariete Analysis Application With IBM SPSS 25 Program*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*. Badan Penerbit Undip.
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Hair Jr, J. F. H., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Sage.
- Hardiningsih, P., Srimindarti, C., Anggana Lisiantara, G., & Kartika, A. (2024). How does environmental, social, governance disclosure and political connection performance affect firm value? An empirical study in Singapore. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2377764>
- Herman, S., & Abbas, D. S. (2024). The Influence of The Independent Board of Commissioners, Tax Avoidance And Institutional Ownership on Company Value Moderation by Corporate Social Responsibility. *Simposium Ilmiah Akuntansi (SIA)*, 9(2), 1164–1168. <https://doi.org/10.35940/ijeat.b3401.129219>
- Idris, F., Buchdadi, A. D., Muttaqien, M. R., & Hariguna, T. (2020). The role of the board of director with political connection for increasing the firm value. *Accounting*, 6(7), 1285–1290. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.8.023>
- Ika, S. R., Rachmanti, Z., Nugroho, J. P., & Putri, W. H. (2021). Political Connection, Corporate Governance, and Firm Value: Indonesian Evidence. *Proceedings of the 7th Regional Accounting Conference (KRA 2020)*, 173(Kra 2020), 37–45. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210416.006>

- Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra, M. (2020). The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance. *Talent Development & Excellence*, 12(I), 3203–3216. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=144289767&lang=ja&site=ehost-live>
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 72(10), 1671–1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Khairunnisa, K., & Angyani, R. (2023). The Effect of Leverage, Profitability, Company Size, and Political Connection on Tax Avoidance. *KAJIAN AKUNTANSI*, 25(2), 3000–3009. <https://doi.org/10.46254/eu05.20220578>
- Khairunnisa, K., & Angyani, R. (2024). *The Effect of Leverage, Profitability, Company Size, and Political Connection on Tax Avoidance*. 25(2), 3000–3009. <https://doi.org/10.46254/eu05.20220578>
- Khan, N., Ullah, N., Aman, N., & Sulehri, N. A. (2020a). Impact of Tax Avoidance on Firm Value and the Moderating Role of Corporate Governance: Evidence From Pakistan Manufacturing Firms. *Iqra Journal of Business and Management (IJBM)*, 122(2), 2020.
- Khan, N., Ullah, N., Aman, N., & Sulehri, N. A. (2020b). Impact of Tax Avoidance on Firm Value and the Moderating Role of Corporate Governance: Evidence From Pakistan Manufacturing Firms. *Iqra Journal of Business and Management (IJBM)*, 122(2), 2020. <https://iqrajbm.com/wp-content/uploads/2022/12/Article-1-Volume4-Issue2-2020.pdf>
- Kholid, A. W. N., & Rahmawati, E. (2023). Does Executive Compensation Reinforce the Influence of Political Connection and Investment Opportunity Set on Firm Value? *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 15(2), 139–152. <https://doi.org/10.15294/jda.v15i1.44081>
- Kristanto, A. (2020). Pengaruh Political Connections Terhadap Kinerja Perusahaan. *Exero:Journal of Research in Business and Economics*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.24071/exero.v2i1.2049>
- Mangoting, Y., Gunadi, C., Tobing, F. P. D., & Putri, O. A. (2020). Governance Structure, Tax Avoidance, and Firm Value. *Proceedings of the 5th International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management and Social Science*, 158(Teams), 397–407. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201212.056>

- Merendino, A., & Melville, R. (2019). The board of directors and firm performance: empirical evidence from listed companies. *Corporate Governance (Bingley)*, 19(3), 508–551. <https://doi.org/10.1108/CG-06-2018-0211>
- Minh Ha, N. M., Tuan Anh, P., Yue, X. G., & Hoang Phi Nam, N. (2021). The impact of tax avoidance on the value of listed firms in Vietnam. *Cogent Business and Management*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1930870>
- Momon, Wati, L. N., & Sutar. (2021). The role of political connections and family ownership in increasing firm value. *ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives*, 10, 40–53. <https://doi.org/10.35944/jofrp.2021.10.1.003>
- Natsir, K., & Yusbardini, Y. (2019). The Effect of Asset Structure and Firm Size on Firm Value with Capital Structure as Intervening Variable. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 145. <https://doi.org/10.4172/2167-0234.1000298>
- Oyetunji, R., Shittu, I., & Bello, A. (2023). Board diversity, Political Connections and Firm value: An Empirical Evidence from Financial Firms in Nigeria. *Tuijin Jishu/Journal of Propulsion Technology*, 44(3), 711–728. <https://doi.org/10.52783/tjpt.v44.i3.366>
- Pratama, V. Y., & Setiawan, D. (2019). Political Connection and Firm Value in Indonesia. *Sebelas Maret Business Review*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.20961/smbr.v3i2.14932>
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2020). Partial Least Squares Structural Equation Modeling. In *Handbook of Market Research* (Issue September). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-05542-8>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). Research Methods for Business A Skill-Building Approach. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Shidqi, F., Darmawan, M. I., Ramadhan, M. I., & Firmansyah, A. (2024). The Moderating Role of Independent Commissioner in Relationship between Tax Aggressiveness and Firm Value. *Educoretax*, 4(2), 171–183. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i2.720>
- Sholihin, P. M., & Ratmono, D. D. (2021). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 7.0*. Penerbit Andi.
- Shubita, M. F. (2024). The effect of tax avoidance on firm value with leverage as a moderating variable. *Investment Management and Financial Innovations*, 21(2), 336–344. [https://doi.org/10.21511/imfi.21\(2\).2024.27](https://doi.org/10.21511/imfi.21(2).2024.27)
- Supatmi, S., Sutrisno, S., Saraswati, E., & Purnomosidhi, B. (2021). Abnormal related party transactions, political connection, and firm value: Evidence from

indonesian firms. *International Journal of Business and Society*, 22(1), 461–478. <https://doi.org/10.33736/IJBS.3189.2021>

Widarjo, W., Sudaryono, E. A., Sutopo, B., Syafiqurrahman, M., & Juliati, J. (2021). The Moderating Role of Corporate Governance on the Relationship between Political Connections and Tax Avoidance. *JDA Jurnal Dinamika Akuntansi*, 2(1), 62–71. <http://dx.doi.org/10.15294/jda.v13i1.26359><http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jdaauthor>

